

SKRIPSI

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**IRMAYANTI MUCHTAR
2120203861211016**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**IRMAYANTI MUCHTAR
NIM : 2120203861211016**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten

Nama Mahasiswa : Irmayanti Muchtar

NIM : 2120203861211016

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-4593/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M



NIP : 199126062023211035

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Irmayanti Muchtar

NIM : 2120203861211016

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-4593/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025

Tanggal Kelulusan : 12 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

Sulkarnain, M.Si. (Anggota)



Mengetahui
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710288 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul " Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang " ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Almarhumah Ibunda tercinta dan pintu surgaku (Hj. P. Sinnong), terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, gelar sarjana penulis sangat dinantikan Ibunda namun sayangnya beliau meninggal disaat proses penyelesaian penulis semoga Ibu melihat putri kecil ibu dari tempat terbaik di sisi-Nya. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, terima kasih, serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Ibu.

Penulis juga mengucapkan Banyak terima kasih kepada Ayahanda cinta pertamaku (Mukhtar), sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Beliau

memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, sehat selalu dan panjang umur Bapak

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Manajemen Keuangan Syariah dan juga menjadi Dosen Penasehat Akademik saya.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. dan Bapak Sulkarnain, M. Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah

banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.

8. Bapak Agurhan, SE.Ak., MM sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang yang telah memberikan izin kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang dibelakang layar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungannya dalam proses penyelesaian ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 25 Desember 2025

Penulis



IRMAYANTI MUCHTAR
2120203861211016

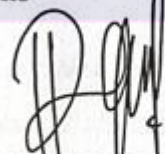
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Irmayanti Muchtar
NIM : 2120203861211016
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 23 Maret 2003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau selanjutnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal dan dihukum.

Parepare, 25 Desember 2025
Penulis


IRMAYANTI MUCHTAR
2120203861211016

ABSTRAK

Irmayanti Muchtar. *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh Bapak Trian Fisman Adisaputra).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dari pegawai sub bagian keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kab. Pinrang. Instrumen penelitian telah diuji validitas dan realibilitasnya, serta diuji melalui asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik SPSS versi 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah semakin tinggi menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi. Sehingga, dengan menyajikan laporan keuangan daerah yang baik, memberikan kemudahan akses terhadap pengguna laporan keuangan daerah serta memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	18
C. Kerangka Konseptual	36
D. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat penelitian	39
C. Populasi dan Sampel penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan.....	40

E. Definisi Operasional.....	42
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Analisis Penelitian.....	51
B. Pembahasan Penelitian	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93
BIODATA PENULIS	135

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	37
4.1	Histogram dengan Kurva Normal	69
4.2	Kurva P-Plot Normal	70



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Transparansi dan Akuntabilitas (P1)	52
4.2	Transparansi dan Akuntabilitas (P2)	52
4.3	Transparansi dan Akuntabilitas (P3)	53
4.4	Transparansi dan Akuntabilitas (P4)	54
4.5	Transparansi dan Akuntabilitas (P5)	54
4.6	Transparansi dan Akuntabilitas (P6)	55
4.7	Transparansi dan Akuntabilitas (P7)	56
4.8	Transparansi dan Akuntabilitas (P8)	56
4.9	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P1)	57
4.10	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P2)	58
4.11	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P3)	58
4.12	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P4)	59
4.13	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P4)	60
4.14	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P6)	60
4.15	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P7)	61
4.16	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P8)	62
4.17	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P9)	62
4.18	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P1)	63
4.19	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P2)	64
4.20	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P3)	64
4.21	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P1)	65
4.22	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P2)	65
4.23	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P3)	66
4.24	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P4)	66

4.25	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P5)	67
4.26	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P6)	68
4.27	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P7)	68
4.28	Uji Normalitas Kolmogorov-Sminorv	71
4.29	Uji Multikolinieritas	72
4.30	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	73
4.31	Uji Koefisien Determinasi	75
4.32	Hasil Uji F	77
4.33	Hasil Uji T	78



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang	95
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Pinrang Periode 2022-2023	101
3.	Kuisisioner Penelitian	110
4.	Hasil Pengolahan Data SPSS	118
5.	SK Pembimbing	130
6.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Parepare	131
6.	Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kab. Pinrang	132
7.	Surat Selesai Meneliti dari Dinas BPKPD Kab. Pinrang	133
8.	Dokumentasi Penelitian	134
9.	Biodata Penulis	136

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

().

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

أَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : al-madīnah al-fāḍilah atau almadīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-haqq*

الْحَج : *al-hajj*

نُوعٍ : *nu'ima*

أَدْو : *'aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asysyamsu*)

الْهَزْلَزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *azzalزالah*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُون : *ta'murūna*

النَّهْو : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرُت : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ ِالله : *Dīnullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ ِالله : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi ‘a
linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila
fih al-Qur'an Nasir al-Din al-
Tusī*

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta'āla s
aw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS
Ibrahīm/ ..., ayat 4 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحة

= بدونمكان

دم

= صلى الله عليه وسلم

صلعم طبعة

=

ط

= بدون ناش

= دن إلى آخرها/ آخره

الخ

= جزء

ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan nasional dan merupakan unsur kunci dalam penyelenggaraan sistem tersebut, yang dapat mengoptimalkan potensi pembangunan suatu daerah dan mencapai tujuan peningkatan kualitas pembangunan. Bentuk khusus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan Negara Tahun 2003, yang mensyaratkan pelaksanaan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi, dan jika masyarakat atau pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi tersebut maka harus memuat informasi yang jelas. Menurut Lalolo transparansi merupakan asas yang menjamin bahwa setiap orang memiliki atau bebas mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan dan proses pembuatan serta hasil

yang dicapai.¹ Pemerintah harus mematuhi undang-undang yang berlaku saat mengelola sumber daya. Akuntabilitas adalah elemen yang berbeda, tetapi merupakan unit yang tidak dapat dipisahkan. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya didapatkan. Namun, pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal.²

Al-Qur'an yang relevan dengan penelitian kali ini yang membahas aksesibilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah:

QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ
يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَى أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ
يُخْسِرُونَ وَرَزُّهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا

Artinya:

"Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3).

Ayat ini menegaskan larangan sikap curang dan mengurangi dalam transaksi serta pengelolaan keuangan, yang sejalan dengan konsep transparansi dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

¹ Lalolo, Loina Krina P., "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi" (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, 2003), hal. 13.

² J,Hehanussa. (2015). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta."

Prasyarat untuk mencapai tujuan hal tersebut salah satunya adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Karena kegiatan pemerintah berada dalam lingkup pelaksanaan tanggung jawab masyarakat, maka pemerintah harus dapat menyediakan kepada publik segala informasi keuangan yang relevan. jujur dan terbuka dari segi kuantitas cukup dapat dijadikan sebagai indikasi.³

Kemajuan teknologi dan informais (information technology/IT) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan tetap mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Namun, salah satu kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terletak pada ketidak mampuan menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses penatausahaan, sehingga menimbulkan banyak ketidak akuratan data dalam proses akuntansi yang menghasilkan LKPD baik neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Arus Kas, Laporan Operasional, laporan saldo anggaran lebih, maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kelemahan lain pada pengelolaan keuangan daerah adalah tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak data penting yang hilang. Disamping itu, saat ini laporan keuangan cenderung masih dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan melalui internet, surat kabar atau akses publik lainnya yang menjadi sarana publik untuk menilai transparansi pemerintah, belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan.

³ Trian Fisman Adisaputra Asriadi Arifin, Dian Novianti, “.,” *Manajemen Zakat BAZNAS* 5, no. 1 (2021).

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Namun, upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang bunyinya: “Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.⁴

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan cara yang mudah bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.⁵ Sedangkan menurut Mustofa aksesibilitas adalah proses pengungkapan laporan keuangan untuk konsumsi publik.⁶ Hak publik

⁴ Nabila Ayu Indria, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya”, hal. 5.

⁵ Fauziyah, RezaMiftahul. (2017). “Pengaruh Penyajiandan Aksebilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6): 1-16.

⁶ Mustofa, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (2012)*”, hal.3, sumber: repository UIN Alauddin Makassar (diakses pada 28 Juni 2025).

untuk mengakses informasi keuangan bermula dari konsep akuntabilitas publik.⁷ Aksesibilitas laporan keuangan merupakan cara mudah bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Efektifitas penggunaan informasi keuangan bergantung pada pembacaan dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan.⁸

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan anggaran. Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah di Indonesia telah melakukan usaha dalam penyajian laporan keuangan yang baik serta meningkatkan aksesibilitas laporan tersebut kepada masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana penyajian laporan keuangan dan kemudahan akses terhadap laporan tersebut berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Data dan laporan keuangan daerah Kabupaten Pinrang, misalnya yang disajikan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang 2022-2023, menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai transparansi yang optimal. Penyajian yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami serta akses yang mudah bagi masyarakat atas laporan tersebut diyakini dapat meningkatkan tingkat

⁷ J,Hehanussa. (2015). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta."

⁸ Sanjaya,Putra I Dewa., Sujana Edydan Sulindawati Ni LuhGedeErni.(2014). "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi*, 2(1):1-12. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 TentangStandar Akuntansi Pemerintahan. 2010." Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik.

Transparansi pengelolaan keuangan menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas yang saat ini semakin mendapat perhatian, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan akses data keuangan daerah secara lebih terbuka dan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan di Kabupaten Pinrang sebagai upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kajian ini didasari oleh pentingnya pemahaman mengenai mekanisme penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan yang efektif agar dapat memberikan gambaran yang transparan tentang kondisi keuangan daerah kepada publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pengawasan dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. laporan keuangan perusahaan mengukur kinerja keuangann dengan menggunakan metode konvensional yaitu analisis rasio keuangan.⁹

Sumber data dan hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang masih dapat ditingkatkan, sehingga penelitian ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang lebih konkret berdasarkan bukti empiris.

Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks kebijakan keuangan daerah tetapi juga penting bagi pengembangan ilmu akuntansi dan tata kelola pemerintahan

⁹ Damirah IAIN Yusrianti Hanike, “.,” *Modifikasi Model Analisis Structural Equation Model (SEM) Pada Reaksi Pasar Di Perusahaan Bursa Efek Indonesia Melalui Modification Indices* 6, no. 2 (2018).

daerah yang transparan dan akuntabel. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan Laporan Keuangan pemerintah kabupaten pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis di bidang akuntansi sektor publik dan mengenai penyajian laporan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang sama.
3. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut ringkasan penelitian relevan yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Dedy Aries Poae pada tahun 2013 bersama David P.E. Saerang melakukan penelitian yang membahas pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitasnya terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian tersebut menggunakan teori stewardship dan pendekatan analisis statistik, termasuk uji validitas, reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
 - a. Penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi pemerintahan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Aksesibilitas laporan keuangan juga berperan penting dalam mendorong transparansi, namun, di Kabupaten Kepulauan Talaud ditemukan bahwa pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas belum signifikan (berbeda dengan beberapa daerah lain).

Penelitian ini mempertegas bahwa kualitas penyajian dan kemudahan akses informasi keuangan publik merupakan faktor utama dalam membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Temuan ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperluas aksesibilitasnya, demi memperkuat

transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.¹⁰

2. Charli Andreas Saragih (2015) adalah penulis skripsi atau penelitian berjudul "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun". Penelitian ini banyak dijadikan rujukan dalam studi terkait akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Inti Penelitian Saragih (2015) Tujuannya Meneliti pengaruh kualitas penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Simalungun dan adapun hasilnya penyajian laporan keuangan daerah yang baik secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas; semakin mudah laporan diakses publik, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Kontribusi penelitian ini memperjelas pentingnya kualitas penyajian dan keterbukaan laporan keuangan pemerintah daerah, kemudahan akses masyarakat terhadap informasi keuangan public dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai praktik tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹

¹⁰ Dedy Aries Poae dan David P.E. Saerang, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (2013)."

¹¹ Saragih, Charli Andreas. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun." JOM FEKON Vol.2 No.2.

3. Riyan Eriko Zama pada tahun 2016 menyelesaikan skripsi berjudul "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Pringsewu" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dua variabel yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Inti dari penelitian Riyan Eriko Zama adalah sebagai berikut:
- a. Akuntabilitas keuangan daerah dipahami sebagai proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - b. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan informasi keuangan yang benar dan dapat dipublikasikan secara terbuka agar pengguna laporan dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah.
 - c. Populasi penelitian adalah anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pringsewu.
 - d. Metode pengumpulan data berupa survei dengan penyebaran kuesioner, dan analisis data menggunakan regresi berganda serta uji statistik lain seperti uji F dan uji t.
 - e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penyajian laporan keuangan daerah maupun aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menegaskan pentingnya kualitas penyajian dan kemudahan akses laporan keuangan sebagai faktor utama yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga direkomendasikan agar instansi pemerintah daerah terus meningkatkan kedua aspek tersebut demi transparansi dan akuntabilitas keuangan publik yang lebih baik¹²

4. Superdi (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem akuntansi yang sesuai standar (berbasis akrual) serta penyajian laporan yang jelas dan mudah diakses oleh publik sebagai faktor utama dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Beberapa poin utama dari penelitian Superdi (2017) adalah:
 - a. Sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan memastikan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan secara komprehensif dan akuntabel.
 - b. Penilaian dan evaluasi sistem pencatatan dan penyampaian laporan keuangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

¹² Riyan Eriko Zama, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Pringsewu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis," Universitas Lampung, 2016

- c. Penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan memudahkan masyarakat atau stakeholder dalam mengakses informasi keuangan daerah (aksesibilitas).
- d. Penelitian menemukan bahwa ketiga variabel tersebut, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan sistem akuntansi keuangan daerah, memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- e. Indikator sistem akuntansi yang digunakan antara lain basis akuntansi, unsur laporan realisasi anggaran, penyusunan APBD, dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru (PP Nomor 12 Tahun 2019).

Penelitian ini menjadi acuan penting dalam studi akuntansi sektor publik, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik.¹³

5. Nabila Ayu Indria pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyajian laporan keuangan yang jelas dan komprehensif serta kemudahan akses publik terhadap laporan tersebut sebagai faktor kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Beberapa poin utama dari penelitian Nabila Ayu Indria (2018) antara lain:

¹³ Superdi, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (2017)."

- a. Penyajian laporan keuangan daerah yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Aksesibilitas laporan keuangan juga berperan positif signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
 - c. Namun, dalam beberapa hasil, ditemukan perbedaan pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan beberapa penelitian menunjukkan pengaruh tidak signifikan atau negatif, tetapi yang dipaparkan Indria menunjukkan pengaruh positif.
 - d. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka, lengkap, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat demi mendorong akuntabilitas publik.
 - e. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya peningkatan kualitas penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip good governance. Penelitian ini memiliki relevansi penting bagi studi akuntansi sektor publik dan evaluasi tata kelola keuangan daerah di Indonesia.¹⁴
6. AA Frihatni, Nirwana, dan Syamsuddin (2021) penelitian mereka berjudul "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab. Parepare" mengkaji bagaimana pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian

¹⁴ Nabila Ayu Indria, *"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya"* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Badan Keuangan Daerah Kab. Parepare. Hasil penelitian menunjukkan:

- a. Publikasi laporan keuangan dilakukan melalui media cetak dan elektronik yang dapat diakses oleh publik sehingga mendukung transparansi.
- b. Laporan keuangan yang dipublikasikan mencakup rincian keuangan dan realisasi anggaran yang sudah disetujui dalam APBD.
- c. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran melalui Musrenbang, memperkuat keterlibatan publik dan pengawasan.
- d. Akuntabilitas diimplementasikan sesuai dengan standar kinerja dan rencana kerja pemerintah daerah.

Namun, tantangan masih ada pada ketepatan waktu pelaporan dan penyajian informasi yang belum sepenuhnya lengkap atau optimal dalam hal aksesibilitas. Studi ini menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses bagi publik sebagai faktor utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.¹⁵

7. S. Syukri (2023) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi dan analisis akuntansi syariah terkait dengan transparansi laporan keuangan daerah Kab. Parepare. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dan studi kasus, dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

AA Frihatni, Nirwana, dan Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab. Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2021): 229-239.

- a. Bentuk transparansi tercermin dari realisasi anggaran pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan.
- b. Sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan WaliKab. Parepare Nomor 26 Tahun 2020.

Namun, meskipun sistem pelaporan telah dilakukan sesuai regulasi, transparansi pelaporan keuangan daerah di Kab. Parepare secara umum masih belum maksimal karena laporan keuangan masih sebatas mencatat dan menyampaikan informasi secara tertulis dan lisan tanpa adanya keterbukaan penuh yang dapat dijangkau oleh publik secara mudah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan aksesibilitas dan transparansi dalam pelaporan laporan keuangan daerah agar kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga¹⁶

8. Nurul Atika (2023) yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene": Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Buttu Pamboang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana BLT serta tinjauan akuntansi syariah terhadap proses tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa:
 - a. Penyaluran BLT di Desa Buttu Pamboang sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan pemerintah serta dilakukan secara transparan.

¹⁶ S. Syukri, "Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kab. Parepare" (Parepare: Repository IAIN Parepare, 2023)

- b. Prosedur penyaluran dilaksanakan tepat waktu, dan dokumen keuangan terkait pelaksanaan BLT dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
 - c. Transparansi dan akuntabilitas ini sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.
 - d. Penelitian menekankan perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan dana sosial agar pengelolaan keuangan lebih baik dan terhindar dari penyimpangan.¹⁷
9. R. Yanti (2024) yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa": Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan laporan keuangan dana desa serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dana desa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengambilan sampel desa yang dikelola secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan dana desa diwujudkan dengan penyediaan informasi dalam berbagai media publik seperti baliho dan papan pengumuman desa yang mudah diakses masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diperkuat dengan laporan keuangan yang terstruktur dan diaudit secara berkala. Penelitian juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa melalui mekanisme partisipatif yang terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas ini berkontribusi pada

¹⁷ Nurul Atika, "Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene," Skripsi, IAIN Parepare, 2023.

peningkatan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan berintegritas.¹⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Disclosure

a. Pengertian Disclosure

Disclosure atau pengungkapan laporan keuangan adalah proses penyajian informasi keuangan yang lengkap, jelas, dan transparan kepada publik serta pemangku kepentingan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, disclosure bertujuan memberikan akses yang memadai kepada masyarakat dan pihak terkait terhadap informasi keuangan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.^{19,20}

Pengungkapan ini bukan hanya sekadar menyajikan laporan keuangan, tetapi juga meliputi keterbukaan atas rincian data yang mendukung laporan agar transparansi dan akuntabilitas tercapai.²¹

b. Dasar Regulasi dan Standar Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah wajib mengikuti regulasi yang ditetapkan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP mengatur agar laporan keuangan disusun dengan karakteristik informasi berkualitas yang

¹⁸ R. Yanti, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa," Skripsi, IAIN Parepare, 2024.

¹⁹ Rizky Fudya Hartini, "Analisis Determinasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris pada LKPD Kab. dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017)" (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), tersedia pada repository.unimma.ac.id (diakses pada 28 Juli 2025).

²⁰ eprints.umpo.ac.id, Landasan Teori Penyajian Laporan Keuangan Daerah.

²¹ Repo.darmajaya.ac.id, Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengaruh Disclosure.

meliputi: lengkap, relevan, andal, dan dapat dipahami pengguna.^{22,23}

Dalam SAP juga ditegaskan perlunya penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK) sebagai bagian dari disclosure wajib, agar penyajian laporan tidak hanya simbolik tapi benar-benar informatif dan akuntabel. Dukungan lembaga keuangan dimaksudkan agar mengetahui peran dan fungsi lembaga keuangan.²⁴

c. Konsep utama teori disclosure

- 1) Adequate Disclosure (Pengungkapan Cukup): Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang cukup untuk memenuhi kewajiban hukum dan standar akuntansi, terutama informasi yang diwajibkan oleh lembaga terkait. Pengungkapan jenis ini merupakan minimum yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
- 2) Fair Disclosure (Pengungkapan Wajar): Pengungkapan dilakukan dengan menyajikan informasi yang memuaskan kebutuhan pengguna laporan keuangan, termasuk informasi tambahan yang dianggap relevan untuk memberikan gambaran yang adil dan seimbang.
- 3) Full Disclosure (Pengungkapan Penuh): Prinsip ini menekankan kelengkapan penyajian semua informasi yang relevan, sehingga

²² Romi Permadi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," Repository UIN.

²³ Repo.darmajaya.ac.id, Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengaruh Disclosure.

²⁴ Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Stain, “.,” *Pengembangan Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* 16, no. 1 (2018).

pengguna laporan dapat memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara utuh²⁵

d. Teori Pendukung Pengungkapan

Landasan teori disclosure banyak menggunakan dua teori utama yaitu:

- 1) Teori Stewardship: Menempatkan pemerintah daerah (pengelola keuangan) sebagai steward yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan laporan keuangan yang jujur, terbuka, dan lengkap kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya.²⁶
- 2) Teori Agensi: Menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat) dengan agen (pemerintah daerah) di mana pengungkapan informasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan monitoring agar agen tidak menyalahgunakan sumber daya yang dipercayakan.²⁷

Kedua teori ini menekankan pentingnya disclosure untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

e. Fungsi dan Manfaat Disclosure

Pengungkapan informasi keuangan yang efektif memiliki fungsi dan manfaat utama sebagai berikut:^{28,29}

²⁵ Dita Andra Eny, Devi Nurulitasari, dan Usnan, Teori Akuntansi (Surakarta: FEBI UIN Surakarta, 2018), 157-158.

²⁶ Saragih, Charli Andreas. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun.

²⁷ Riyan Eriko Zama, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Pringsewu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, 2016

²⁸ Romi Permadi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," Repository UIN.

- 1) Meningkatkan Transparansi: Disclosure memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengetahui kondisi keuangan daerah serta penggunaan anggaran secara nyata.
 - 2) Memperkuat Akuntabilitas: Dengan pengungkapan yang lengkap, pemerintah daerah dinilai dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan dana publik.
 - 3) Membantu Pengambilan Keputusan: Informasi yang transparan memungkinkan pemerintah, investor, dan masyarakat membuat keputusan yang tepat, misalnya dalam perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja.
 - 4) Mendukung Opini Audit WTP: Disclosure yang baik mempengaruhi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini audit yang menetapkan kewajaran laporan keuangan daerah.
- f. Indikator Tingkat Pengungkapan (Disclosure Level)

Pengukuran tingkat pengungkapan dapat dilakukan melalui indikator seperti kelengkapan dokumen laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan kemudahan akses informasi. Indikator khusus dapat berupa:^{30,31}

- 1) Tersedianya dokumen laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan CaLK secara lengkap.

²⁹ eprints.umpo.ac.id, Landasan Teori Penyajian Laporan Keuangan Daerah.

³⁰ Rizky Fudya Hartini, Analisis Determinasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris pada LKPD Kab. dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017) (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), tersedia pada repository.unimma.ac.id (diakses pada 28 Juli 2025).

³¹ Repo.darmajaya.ac.id, Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengaruh Disclosure.

- 2) Keterbukaan data keuangan daerah di media publik, termasuk website resmi pemerintah daerah.
 - 3) Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian informasi.
- g. Tantangan dalam Disclosure Laporan Keuangan Daerah

Meskipun regulasi dan teori sudah jelas, implementasi disclosure di daerah terkadang terhambat oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas teknologi informasi yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi.³² Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor penyajian dan aksesibilitas mempengaruhi tingkat disclosure dan transparansi di pemerintah daerah. Sebagai peneliti yang mengkaji teori disclosure dalam manajemen keuangan, khususnya dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah, saya menyimpulkan bahwa teori disclosure berperan sangat penting dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Intinya, teori disclosure menekankan bahwa pengungkapan informasi keuangan yang lengkap, jujur, dan tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak pengelola keuangan dengan para pemangku kepentingan. Seperti masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan kata lain mempermudah kemungkinan akses informasi yang sama dan transparan sehingga pihak publik dapat menilai kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah secara objektif atau secara ringkas, teori disclosure dalam manajemen keuangan menegaskan bahwa

³² Repo.darmajaya.ac.id, Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengaruh Disclosure.

transparansi melalui pengungkapan informasi keuangan yang baik merupakan fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

2. Pengertian Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pembiayaan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemerintahan daerah yang mengelola segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dalam mata uang dan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pasal 293 dan 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tugas pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004³³, dalam rangka menyelesaikan permasalahan di pemerintahan daerah, hal ini menjadi dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah dalam "UU No. 23" 2014 menjadi kebijakan pemerintah daerah berdampak signifikan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah (termasuk regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah).

³³ Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah juga mengutip peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perbendaharaan, Nomor Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Nasional dan Pemeriksaan Akuntabilitas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, “Peraturan Pemerintah” ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah” dalam “Peraturan Pemerintah” Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan tersebut juga telah disempurnakan untuk menjaga tiga (tiga) pilar pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pengukuran kinerja perusahaan selama ini sangat beragam.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka “Peraturan Pemerintah” ini meliputi pengaturan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, serta tanggung jawab keuangan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan Pemerintah ini dimulai dengan pembentukan KUA. untuk menentukan proses penyusunan APBD. Dan PPAS, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya RKA SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada APBD dan kemudian Rancangan Peraturan

³⁴ Trian Fisman Adisaputra, “.,” *Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja* 6, no. 30 (2021).

Daerah dan Rancangan Pimpinan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas guna mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, draf Perda dan draf Perkada diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi sebagai wakil pemerintah pusat / daerah atau menteri provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan Perda dan rancangan Perkada telah sesuai dengan dokumen pendukung, kemudian dijadikan dasar bagi kepala daerah untuk menyusun rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD. Rancangan Perkada tersebut akan menjadi uraian rinci Perkada tentang APBD.

Indikator kinerja APBD telah dimasukkan ke dalam format RKA, namun selama ini pembahasan anggaran di pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada jumlah uang yang dikeluarkan daripada keluaran dan hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana disebutkan di atas, anggaran metodologi kinerja lebih menitikberatkan pada keluaran dan hasil kegiatan.³⁵

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan pengelolaan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus memenuhi indikator kinerja yang disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, perencanaan dan anggaran dapat disesuaikan secara tepat, dan jumlah kesalahan dalam pelaksanaan dan proses pengelolaan dapat diminimalisir.

³⁵ Tien Asmara Palintan Nadia, Muftihatul Khaeriyah, “.,” *Pengembangan Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Model Parenting*, 2024.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Sistem akuntabilitas keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Mengenai keberadaan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyiapkan paling sedikit 7 (tujuh) laporan keuangan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasi, laporan perubahan neraca kelebihan anggaran, laporan perubahan ekuitas, arus kas. laporkan dan laporkan catatan.

Sebagai peneliti yang mempelajari teori pengelolaan keuangan daerah dalam manajemen keuangan, saya menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses menyeluruh yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pengelolaan ini sangat penting untuk menjamin bahwa dana publik yang dikelola pemerintah daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan hasil transaksi pemerintah berdasarkan status keuangan.³⁶ Oleh karena itu laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah harus memuat informasi yang relevan, jujur dan

³⁶ J,Hehanussa. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

terbuka.³⁷ Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik kepada masyarakat.

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang status keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelapor. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Mengemukakan tujuan umum laporan keuangan antara lain :³⁸

- a. memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan hak kepentingan pemerintah.
- b. memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan status ekuitas pemerintah
- c. memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. memberikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. memberikan informasi tentang potensi pemerintah untuk membiayai pengelolaan kegiatan pemerintahan;
- g. memberikan informasi yang membantu menilai kemampuan entitas pelapor untuk mendanai aktivitasnya.

³⁷ Sumiyati. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas. Jakarta.

³⁸ Sanjaya, Putra I Dewa., Sujana Edydan Sulindawati Ni Luh Gede Erni. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Pernyataan 17 dalam PP No. Pernyataan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa informasi yang diberikan dalam Laporan Keuangan Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, pelaporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap kelompok pengguna. Laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah berisi informasi yang menggambarkan status keuangan pemerintah daerah selama periode pelaporan tahunan, dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pengguna pemerintah.³⁹

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Laporan keuangan adalah laporan keuangan bertujuan umum, disusun atas dasar kas untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, transfer dan proyek pendanaan, dan atas dasar akrual untuk mengakui proyek aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna. keuangannya didapat dari keuangan yang telah dicapai perusahaan dalam suatu periode melalui berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan.⁴⁰

³⁹ Saputra, Rahmawan, (2012). Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

⁴⁰ Trian Fisman Adisaputra et al., “.,” *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* 5, no. 2 (2023).

Yang disebut pengguna merujuk pada publik, legislatif, lembaga pemeriksa / pengawas, pihak yang menyediakan atau berperan dalam proses pendanaan, investasi dan pinjaman, dan pemerintah. Laporan keuangan mencakup konten yang diperke nalkan dalam laporan keuangan yang disampaikan secara terpisah atau bagian dari laporan keuangan dalam dokumen publik lainnya (seperti laporan tahunan).

Dalam "Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah" (PSAP) 1, paragraf 49 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010)⁴¹ disebutkan bahwa neraca harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; pajak dan Piutang bukan pajak Dana; saham; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan dana saham.

Ruang lingkup pengawasan PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada Oktober 2010, seluruh entitas pelapor pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual, namun bagi entitas pelapor yang belum siap sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual, pada tahun 2014 sebelum tahun, SAP berbasis uang tunai masih diizinkan untuk mengakumulasi pendapatan mereka. Hal ini dijelaskan dalam PP, yaitu, SAP berbasis kas terakumulasi, yaitu SAP mengakui pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan berbasis kas, dan mengakui aset yang masih harus dibayar, hutang, dan ekuitas modal.

⁴¹ Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Pasal 7 mengatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara berjenjang. Peraturan mengenai penerapan SAP secara bertahap di pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. . Kementerian Dalam Negeri. Sebagai peneliti yang mengkaji teori penyajian laporan keuangan daerah dalam manajemen keuangan, saya menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah teori penyajian laporan keuangan daerah menegaskan bahwa penyajian yang sesuai standar, lengkap, jelas, dan tepat waktu adalah kunci utama dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berkelanjutan.

4. Akseibilitas laporan keuangan daerah

Perspektif spasial, aksesibilitas mengacu pada kondisi atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lain, atau kemudahan orang atau kendaraan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, dan dengan kecepatan yang wajar.⁴² Aksesibilitas laporan keuangan merupakan cara mudah untuk memperoleh informasi laporan keuangan.⁴³ Hak publik untuk memperoleh informasi keuangan merupakan hasil dari konsep tanggung jawab publik. Akuntabilitas publik mengharuskan organisasi publik

⁴² Rohman, Abdul. (2009). "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No 1 Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang.

⁴³ Mulyana Budi, Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 No. 1, Mei 2006

untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti akuntabilitas dan manajemen.⁴⁴

Terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004⁴⁵ tentang Pendapatan dan Belanja Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 103 mengatur bahwa informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan daerah adalah data publik yang dapat dipahami, diakses, dan diperoleh masyarakat. Artinya, pemerintah daerah harus memiliki akses publik ke berbagai pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang mereka hasilkan, seperti menerbitkan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain.

Pelaporan keuangan pemerintah juga merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Metode efektif dalam memperoleh informasi bergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban dan pemahaman serta penggunaan informasi tersebut.⁴⁶ Hak akses yang diberikan oleh media seperti koran, majalah, radio, stasiun TV dan website (internet), serta forum yang memberikan perhatian langsung dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab secara sosial.⁴⁷ mengemukakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan

⁴⁴ Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik .Penerbit Andi. Yogyakarta

⁴⁵ Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

⁴⁶ Sanjaya, Putra I Dewa., Sujana Edy dan Sulindawati Ni Luh Gede Erni. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

⁴⁷ Wahyuni, Sri Putu., Sulindawati., dkk. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. E-Journal. Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Jakarta.

keuangan daerah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Keterbukaan, artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
 - b. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. Akses tanpa hambatan (Accesible), yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website) Keterbukaan informasi publik dapat dilihat pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwasetiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diaksesoleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasiharus dapatdiperoleh setiap pemohon informasi public dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana
- Aksesibilitas organisasi sektor publik dapat ditingkatkan melalui Permendagri No.3 Tahun 2017 (Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi) Kemendagri dan pemerintahdaerah yang dimana bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab;

- b. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan informasi dan dokumentasi berkualitas tinggi.

Agar informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD, tetapi juga mendorong pemahaman masyarakat luas. masyarakat. Menemukan atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.⁴⁸ Sebagai peneliti yang mengkaji teori aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam manajemen keuangan, saya menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan unsur krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Aksesibilitas ini mencakup kemudahan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh, membaca, dan memahami laporan keuangan pemerintah daerah tanpa hambatan serta ketersediaan laporan tersebut secara terbuka atau secara ringkas, teori aksesibilitas dalam konteks laporan keuangan daerah menegaskan bahwa memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi keuangan daerah kepada publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih, dan akuntabel.

5. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴⁸ Aliyah S dan Nahar A (2012) , Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi& Auditing, Volume 8, No. 2, Mei 2012: 97-189.

Transparansi adalah bahwa publik memiliki hak untuk secara terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban untuk merumuskan kebijakan publik secara publik dengan memperoleh dan memberikan informasi yang benar, jujur dan non-diskriminatif kepada publik, terlepas dari apakah masyarakat membutuhkannya.

Transparansi menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk menyusun kebijakan keuangan daerah agar DPRD dan masyarakat dapat memahami dan mengawasi.”⁵⁰ Transparansi merupakan salah satu ciri kebaikan sebuah Tata Kelola. Transparansi didasarkan pada kebebasan untuk memperoleh informasi yang berlaku dengan adanya kepentingan public yang secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, transparansi dapat didasarkan pada hak publik untuk secara terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercaya dan dikelola, sehingga dapat memberikan keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. informasi. Mematuhi hukum dan peraturan. Prinsip Transparansi pada Pemerintahan dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

⁴⁹ Aliyah S dan Nahar A (2012) , Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi& Auditing, Volume 8, No. 2, Mei 2012: 97-189.

⁵⁰ Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik .Penerbit Andi. Yogyakarta

- a. Adanya sistem keterbukaan dan terstandarisasi yang jelas dan mudah dipahami serta dapat dipahami dari semua proses yang dikelola oleh pemerintah.
- b. Adanya mekanisme bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur administrasi pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme untuk melaporkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran pejabat publik dalam kegiatan administrasi pemerintahan.

Transparansi dilandasi oleh kebebasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat. Artinya, informasi terkait kepentingan publik bisa langsung didapatkan oleh mereka yang membutuhkan.⁵¹ Transparansi dapat berarti tidak hanya menghasilkan laporan tahunan, tetapi juga menjadikannya publik dan dapat diakses oleh publik, karena kegiatan pemerintah dilakukan dalam lingkup tugas masyarakat.

Sebagai peneliti yang mengkaji teori transparansi laporan keuangan daerah dalam manajemen keuangan, saya menyimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip fundamental yang mengharuskan pemerintah daerah untuk secara terbuka mengungkapkan informasi keuangan kepada publik dengan cara yang jelas, lengkap, dan dapat diakses atau teori transparansi dalam laporan keuangan daerah menegaskan bahwa keterbukaan dan akses bebas terhadap informasi keuangan adalah landasan utama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan demokratis, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah

⁵¹ Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik .Penerbit Andi. Yogyakarta

C. Kerangka Konseptual

Pengenalan laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah: ⁵²

1. Memberikan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta bukti akuntabilitas dan hak pengelolaan
2. Memberikan informasi untuk mengevaluasi manajemen dan kinerja organisasi

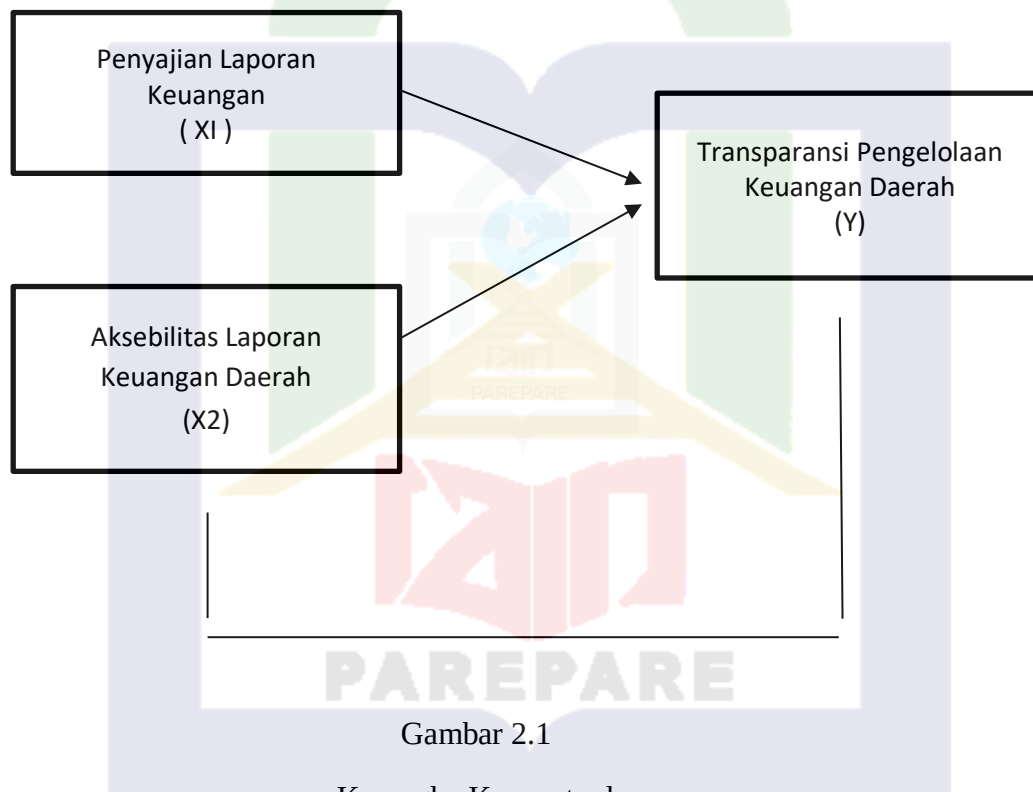
Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan menteri meliputi kewenangan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD di daerah yang belum dibentuk DPRD. , pelaksanaan APBD, dan perubahan APBD, pengelolaan kas, pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan daerah, tanggung jawab pelaksanaan APBD, pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan pemberian otonomi daerah / daerah perKab.an, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama pada bidang anggaran, akuntansi dan audit yang perlu diutamakan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada konsep “value for

⁵² Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik .Penerbit Andi. Yogyakarta

money” (VFM). Pengelolaan keuangan daerah dengan konsep PKS adalah memastikan pengelolaan dana publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya akuntabilitas publik tercapai.⁵³

Kerangka konseptual berikut menjelaskan hubungan antara penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

⁵³ Soesastro, Hadi.dkk. 2005. Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1 :Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

H2 :Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

H3 :Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kausal asosiatif. “Desain kausal dapat digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian, dan juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel mempengaruhi variabel lain”.⁵⁴

B. Tempat penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Pemerintah Daerah Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Jend Sukowati No.40, Macorawalie, Watang Sawitto, Pinrang Regency, South Sulawesi 91212, Indonesia, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih dari satu bulan, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Kegiatannya meliputi pengambilan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

C. Populasi dan Sampel penelitian

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah luas yang terdiri dari objek atau topik yang ditentukan oleh peneliti dan mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang disebut dengan variabel.⁵⁵ Antara populasi umum dan populasi sasaran. Populasi sasaran adalah populasi sasaran untuk merumuskan

⁵⁴ Husein Umar, Metode Riset Perilaku (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2003), hal. 30.

⁵⁵ Sugiono, 2006. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung.

kesimpulan penelitian kami. Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dan berperan dalam pengelolaan maupun penggunaan laporan keuangan di Kabupaten Pinrang, seperti: Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, Pejabat pengelola keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Masyarakat umum dan pengguna laporan keuangan (misalnya, masyarakat, media, akademisi). Karena targetnya adalah seluruh elemen yang terkait dalam proses dan penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah, maka populasi mencakup semua institusi dan aktor yang relevan di Kabupaten Pinrang yang memahami dan berinteraksi dengan laporan keuangan daerah tersebut.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diperoleh berasal dari sumber yang sengaja dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti.⁵⁶ Sampel yang akan diambil dari populasi adalah staf SKPD bagian keuangan dengan kualifikasi staf akuntansi/bagian keuangan daerah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun dan masyarakat akademisi ataupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan kab.Pinrang dengan kriteria umur 20-40 tahun.

D. Teknik Pengumpulan

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

⁵⁶ Sugiono, 2006. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung

sekelompok terhadap fenomena sosial.⁵⁷ Skala ini mempunyai jarak dari positif ke negative terhadap objek sikap tertentu. Skala pengukuran kuisisioner menggunakan skala:

Skor 1 = Sangat tidak setuju

Skor 2 = Tidak setuju

Skor 3 = Netral atau ragu-ragu

Skor 4 = Setuju

Skor 5 = Tidak setuju

1. Jenis data dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuosioner yang dimana telah diisi oleh responden, yaitu Kepala OPD dan Kasubbag bagian keuangan OPD dari masing-masing OPD yang menjadi sampel penelitian.

b. Sumber data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban-jawaban atas kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah kembali.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknologi survei kuesioner, yang dapat memberikan rangkaian

⁵⁷ Sugiono, 2006. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung

pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada narasumber. Alat dalam kuesioner tersebut merupakan tiruan dari peneliti sebelumnya yaitu :⁵⁸

- a. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dan penyebaran kuosioner adalah sebagai berikut : Kuesioner dikirim ke seluruh sampel yang merupakan anggota populasi yang menjadi responden.
- b. Setelah satu minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi para responden.
- c. Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden, peneliti kemudian melakukan pengolahan data jika jumlah kuesioner yang terkumpul melebihi dari 30 tetapi jika data belum mencukupi maka dicoba lagi untuk mengirimkan kuosioner kepada responden yang belum mengembalikan kuosioner.

E. Definisi Operasional

1. Definisi operasional

Berdasarkan desain penelitian asosiasi kausal (desain penelitian menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen), variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

2. Penyajian Laporan keuangan (XI)

Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan lampiran II PP No. 24 Tahun 2005 kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan poin 32-37 bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran

⁵⁸ Hanim, Sustika, 2009. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kab. Langsa)", Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Indikator dari penyajian laporan keuangan menurut IAI (2011) adalah sebagai berikut ini:

- a. Kualitas penting dari informasi yang dimuat dalam laporan dapat dimengerti Keuangan adalah kenyamanan yang langsung dipahami pengguna. Informasi keuangan yang dapat dimengerti adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai untuk pemahaman pengguna.
 - b. Informasi yang relevan dengan kualitas yang relevan, asalkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang atau masa depan, mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu mereka
3. Aksesibilitas laporan keuangan

Dalam penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan variabel bebas (X2). Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan hak akses kepada pemangku kepentingan untuk mencari atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi pemangku kepentingan. Aksesibilitas dari segi spasial berkaitan dengan kondisi atau ketersediaan dari satu tempat ke tempat lain, atau bahwa orang atau kendaraan

dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman dan di satu tempat.⁵⁹ Kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah memudahkan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi para pihak dalam menggunakan laporan keuangan untuk mencari informasi keuangan daerah. Indikator aksesibilitas laporan keuangan adalah hak akses yang diberikan oleh surat kabar, majalah radio, stasiun televisi, dan website serta forum yang menyediakan perhatian langsung.

4. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah variable dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah adanya kebebasan untuk mengakses informasi keuangan yang terbuka dan jujur secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah.

Ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur variabel untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, yaitu :⁶⁰

- a. Pengelolaan Keuangan dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang memadai.

⁵⁹ Aliyah S dan Nahar A (2012) , Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, No. 2, Mei 2012: 97-189.

⁶⁰ Hanim, Sustika, 2009. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kab. Langsa)", Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- b. Penyebarluasan informasi tentang pengambilan keputusan, melalui media massa, media nir massa, dan maupun media komunikasi personal.
- c. Adanya akurasi maupun kelengkapan informasi yang berkaitan dengan cara mencapai sasaran suatu program.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang dicapai oleh pemerintah.
- e. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atau penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan pelayanan.

F. Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut di distribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas dan Realibilitas, Uji Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis, dan Tempat dan Waktu penelitian.

1. Uji Validitas dan realibitas

a. Uji Validitas

Dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing kelompok telah dikelompokkan pada variabel yang telah ditentukan (Ghozali, 2016). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner, apakah pertanyaan yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur dan sesuai dengan apa yang hendak kita ukur. Jika pernyataan pada kuesioner

mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dianggap valid. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya.

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r hitung negatif atau r hitung $< r$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
- 3) Jika r hitung dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total Corelation Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-k$, dimana : n = Jumlah responden k = merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel

b. Uji Reabilitas

Jika dua atau lebih pengukuran gejala yang sama dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sama, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana konsistensi hasil pengukuran. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner sebagai variabel atau indikator penyusun. Jika seseorang (responden) menjawab pernyataan tersebut secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau reliabel.⁶¹ Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas One Shot atau pengujian sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.⁶² Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas terhadap suatu konstruk variabel sama dengan

⁶¹ Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

⁶² Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

melakukan uji validitas. Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama dengan hasil uji validitas.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Diperlakukannya uji asumsi klasik untuk menghindari bias. Karena tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan yaitu terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksud untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen (multikolinieritas). Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel yang bebas. Multikolinieritas dapat dilihat apabila tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Apabila tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah residual model regresi dari satu pengamatan ke pengamatan lain memiliki ketidaksamaan varians. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain konstan disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homogen, tidak homogen. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, salah satunya adalah uji Glejser. Jika probabilitas signifikansi lebih tinggi dari

tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak termasuk heteroskedastisitas.⁶³

f. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi berdistribusi normal, sedangkan model regresi yang baik berdistribusi normal.⁶⁴ Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data mengikuti atau mendekati berdistribusi normal yaitu sebaran data berbentuk lonceng. Data yang dianggap baik adalah data yang berpola seperti berdistribusi normal.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi laporan keuangan daerah

X1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

A = Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi

e = error

⁶³ Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

⁶⁴ Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi (R square), uji t.

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant (α) 0,005. Hal ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan X rata-rata di daerah kritis (daerah tolak) apabila hipotesa benar sebesar 0,005. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).⁶⁵

c. Uji Simultan (Uji-f)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant (α) 0,05. Nilai F hitung yang diperoleh dibandingkan dengan F hitung $> F_{tabel}$, maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah fit.⁶⁶

d. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan kecocokan yang menyatakan proporsi dan variasi total Y (variabel dependen) yang dapat diterangkan oleh X (variabel independen) dan sebagai ukuran linier yang menyatakan seberapa baik garis regresi yang cocok dengan data. Besarnya koefisien determinasi

⁶⁵ Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

⁶⁶ Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti hubungan antar variabel tersebut semakin erat.⁶⁷



⁶⁷Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Penelitian

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Nilai r_{tabel} dengan ketentuan df (*degree of freedom*), yakni dengan Jumlah Responden (n) adalah 90 dan jumlah variabel bebas (k) adalah 3 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka $df = 30 - 3 = 27$. Angka r_{hitung} yang diperoleh adalah 0,2028.

b. Uji Reliabilitas

Jika data yang diuji menunjukkan hasil yang valid, maka langkah berikutnya adalah dengan menguji tingkat reliabilitasnya agar dapat dikatakan data yang berkualitas. Nilai *Cronbach Alpha's* variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) lebih besar dari 0,70 yang berarti bahwa instrumen yang terdapat pada keempat variabel tersebut dinyatakan reliabel. Sehingga, responden mampu menjawab pernyataan dari masing-masing variabel tersebut secara konsisten.

2. Analisis Deskriptif Variabel

a. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y)

Berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 95 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Transparansi dan Akuntabilitas (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	3	3.2	3.2	4.2
	S	64	67.4	67.4	71.6
	SS	27	28.4	28.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang memberikan jawaban tentang pernyataan pertama (Pembuatan laporan keuangan OPD Kab. Pinrang sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*), yakni tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) tidak setuju, 3 orang (3,2%) ragu-ragu, 64 orang (67,4%) setuju, dan 27 orang (28,4%) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.2
Transparansi dan Akuntabilitas (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	7	7.4	7.4	8.4
	S	63	66.3	66.3	74.7
	SS	24	25.3	25.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang memberikan jawaban tentang pernyataan kedua (laporan keuangan OPD Kab. Pinrang telah memenuhi sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) menjawab tidak setuju, 7 orang (7,4%) menjawab ragu-ragu, 63 orang (66,3%) menjawab setuju, dan 24 orang (25,3%) yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.3

Transparansi dan Akuntabilitas (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	6	6.3	6.3	6.3
	S	59	62.1	62.1	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang memberikan jawaban tentang pernyataan ketiga (Laporan Keuangan OPD Kab. Pinrang telah memenuhi standar yang berlaku umum, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 6 orang (6,3%) menjawab ragu-ragu, 59 orang (62,1%) menjawab setuju, dan 30 orang (31,6%) responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.4
Transparansi dan Akuntabilitas (P4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	RR	14	14.7	14.7	16.8
	S	56	58.9	58.9	75.8
	SS	23	24.2	24.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 95 responden yang memberikan jawaban tentang pernyataan keempat (Pengelola sumber daya sebagai pembuat laporan keuangan mampu memberikan laporan pertanggung jawaban secara efisien dan efektif kepada DPRD maupun masyarakat luas), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (2,1%) menjawab tidak setuju, 14 orang (14,7%) menjawab ragu-ragu, 56 orang (58,9%) responden menjawab setuju, dan 23 orang (24,2%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.5
Transparansi dan Akuntabilitas (P5)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	14.7	14.7	14.7
	RR	32	33.7	33.7	48.4
	S	39	41.1	41.1	89.5
	SS	10	10.5	10.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang memberikan jawaban tentang pernyataan keempat (Penyebarluasan laporan keuangan OPD Kab. Pinrang telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 14 orang (14,7%) menjawab tidak setuju, 32 orang (33,7%) menjawab ragu-ragu, 39 orang (41,1%) menjawab setuju dan 10 orang (10,5%) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.6
Transparansi dan Akuntabilitas (P6)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	2	2.1	2.1	3.2
	S	72	75.8	75.8	78.9
	SS	20	21.1	21.1	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan keenam (Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan OPD Kab. Pinrang), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) menjawab tidak setuju, 2 orang (2,1%) menjawab ragu-ragu, 72 orang (75,8%) responden yang menjawab setuju, dan 20 orang (21,1%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.7
Transparansi dan Akuntabilitas (P7)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	1	1.1	1.1	2.1
	S	77	81.1	81.1	83.2
	SS	16	16.8	16.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan ketujuh (Ada ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh OPD Kab. Pinrang), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju dan ragu-ragu, 77 orang (81,1%) responden yang menjawab setuju, dan 16 orang (16,8%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.8
Transparansi dan Akuntabilitas (P8)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	12	12.6	12.6	15.8
	RR	40	42.1	42.1	57.9
	S	34	35.8	35.8	93.7
	SS	6	6.3	6.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab pernyataan kedelapan (Penyampaian laporan keuangan OPD Kab. Pinrang telah melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan), yakni 3 orang (3,2%) yang menjawab sangat tidak setuju, 12 orang (12,6%) responden yang menjawab tidak setuju, 40 orang (42,1%) responden yang menjawab ragu-ragu, 34 orang (35,8%) responden yang menjawab setuju, dan 6 orang (6,3%) responden yang menjawab sangat setuju.

b. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 95 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang penyajian laporan keuangan daerah pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	S	45	47.4	47.4	48.4
	SS	49	51.6	51.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan pertama (OPD Kab. Pinrang mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan ragu-ragu, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju, 45 orang (47,4%) responden yang menjawab setuju, dan 49 orang (51,6%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.10
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	1	1.1	1.1	2.1
	S	48	50.5	50.5	52.6
	SS	45	47.4	47.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kedua (OPD Kab. Pinrang mampumenyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju dan ragu-ragu, 48 orang (50,5%) responden yang menjawab setuju, dan 45 orang (47,4%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.11
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	11	11.6	11.6	12.6
	S	56	58.9	58.9	71.6
	SS	27	28.4	28.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan ketiga (Laporan keuangan OPD Kab. Pinrang menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu), yakni tidak ada

responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju, 11 orang (11,6%) responden yang menjawab ragu-ragu, 56 orang (58,9%) responden yang menjawab setuju, dan 27 orang (28,4%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.12
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	14	14.7	14.7	15.8
	S	66	69.5	69.5	85.3
	SS	14	14.7	14.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan keempat (laporan keuangan OPD Kab. Pinrang menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju, 14 orang (14,7%) responden yang menjawab ragu-ragu, 66 orang (69,5%) responden yang menjawab setuju, dan 14 orang (14,7%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.13
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P5)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	2.1	2.1	2.1
	S	69	72.6	72.6	74.7
	SS	24	25.3	25.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kelima (Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD Kab. Pinrang telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 2 orang (2,1%) responden yang menjawab ragu-ragu, 69 orang (72,6%) responden yang menjawab setuju, dan 24 orang (25,3%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.14
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P6)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	3	3.2	3.2	4.2
	S	73	76.8	76.8	81.1
	SS	18	18.9	18.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan keenam (Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh), yakni tidak ada responden yang menjawab tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab sangat tidak setuju, 3 orang (3,2%) responden yang menjawab ragu-ragu, 73 orang (76,8%) responden yang menjawab setuju, dan 18 orang (18,9%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.15

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P7)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	3	3.2	3.2	3.2
	S	62	65.3	65.3	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan ketujuh (Informasi yang termuat dalam laporan keuangan OPD Kab. Pinrang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 3 orang (3,2%) responden yang menjawab ragu-ragu, 62 orang (65,3%) responden yang menjawab setuju, dan 30 orang (31,6%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.16
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P8)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	5	5.3	5.3	5.3
	S	60	63.2	63.2	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kedelapan (Laporan Keuangan yang disusun oleh OPD Kab. Pinrang telah dapat dijadikan sebagai tolakukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 5 orang (5,3%) responden yang menjawab ragu-ragu, 60 orang (63,2%) responden yang menjawab setuju, dan 30 orang (31,6%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.17
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P9)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	5	5.3	5.3	6.3
	S	74	77.9	77.9	84.2
	SS	15	15.8	15.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kesembilan (Informasi dari alporan keuangan OPD Kab. Pinrang yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju, 5 orang (5,3%) responden yang menjawab ragu-ragu, 74 orang (77,9%) responden yang menjawab setuju, 15 orang (15,8%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

c. **Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Tabel 4.18

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	6	6.3	6.3	9.5
	RR	34	35.8	35.8	45.3
	S	44	46.3	46.3	91.6
	SS	8	8.4	8.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan pertama (Laporan keuangan daerah Kab. Pinrang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa), yakni 3 orang (3,2%) menjawab sangat tidak setuju, 6 orang (6,3%) tidak setuju, 34 orang (35,8%) menjawab ragu-ragu, 44 orang (46,3%) menjawab setuju, dan 8 orang (8,4%) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.19
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	1	1.1	1.1	3.2
	RR	14	14.7	14.7	17.9
	S	65	68.4	68.4	86.3
	SS	13	13.7	13.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kedua (Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah Kab. Pinrang), yakni 2 orang (2,1%) responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,1%) responden yang menjawab tidak setuju, 14 orang (14,7%) responden menjawab ragu-ragu, 65 orang (68,4%) responden yang menjawab setuju, dan 13 orang (13,7%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.20
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	10	10.5	10.5	13.7
	RR	35	36.8	36.8	50.5
	S	37	38.9	38.9	89.5
	SS	10	10.5	10.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan ketiga (Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah Kab. Pinrang melalui internet (*website*)), yakni 3 orang (3,2%) responden yang menjawab sangat tidak

setuju, 10 orang (10,5%) responden yang menjawab tidak setuju, 35 orang (36,8%) responden yang menjawab ragu-ragu, 37 orang (38,9%) responden menjawab setuju, dan 10 orang (10,5%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

d. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tabel 4.21

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	10.5	10.5	10.5
	TS	24	25.3	25.3	35.8
	RR	8	8.4	8.4	44.2
	S	42	44.2	44.2	88.4
	SS	11	11.6	11.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan pertama (Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis kas), yakni 10 orang (10,5%) sangat tidak setuju, 24 orang (25,3%) tidak setuju, 8 orang (8,4%) ragu-ragu, 42 orang (44,2%) setuju, dan 11 orang (11,6%) sangat setuju.

Tabel 4.22

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	1.1	1.1	1.1
	S	58	61.1	61.1	62.1
	SS	36	37.9	37.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kedua (Basis akuntansi

penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah berbasis akrual), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 1 orang (1,1%) menjawab ragu-ragu, 58 orang (61,1%) menjawab setuju, dan 36 orang (37,9%) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.23
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	8	8.4	8.4	8.4
	S	61	64.2	64.2	72.6
	SS	26	27.4	27.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan ketiga (Unsur yang terdapat dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) OPD Kab. Pinrang adalah pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan), yakni tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 8 orang (8,4%) ragu-ragu, 61 orang (64,2%) setuju, dan 26 orang (27,4%) sangat setuju.

Tabel 4.24
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	RR	7	7.4	7.4	9.5
	S	59	62.1	62.1	71.6
	SS	27	28.4	28.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan keempat (Unsur yang terdapat dalam LO (Laporan Operasional) OPD adalah pendapatan-LO, beban, dan pembiayaan), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (2,1%) responden menjawab tidak setuju, 7 orang (7,4%) responden menjawab ragu-ragu, 59 orang (62,1%) responden menjawab setuju, dan 27 orang (28,4) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.25
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P5)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	72	75.8	75.8	75.8
SS	23	24.2	24.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 4.25 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan kelima (Klasifikasi belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dalam penyusunan APBD adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung), yakni tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu, 72 orang (75,8%) responden menjawab setuju, dan 23 orang (24,2%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.26
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P6)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	9	9.5	9.5	10.5
	RR	14	14.7	14.7	25.3
	S	55	57.9	57.9	83.2
	SS	16	16.8	16.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Dari table 4.26 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan keenam (Dalam membuat laporan keuangan daerah, penyelenggara sistem akuntansi harus mengacu pada petunjuk teknis dari atasan), yakni 1 orang (1,1%) yang menjawab sangat tidak setuju, 9 orang (9,5%) responden menjawab tidak setuju, 14 orang (14,7%) responden yang menjawab ragu-ragu, 55 orang (57,9%) responden yang menjawab setuju, dan 16 orang (16,8%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

Tabel 4.27
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P7)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	5	5.3	5.3	6.3
	RR	4	4.2	4.2	10.5
	S	68	71.6	71.6	82.1
	SS	17	17.9	17.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Dari Tabel 4.27 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang menjawab tentang pernyataan ketujuh (Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan adalah belanja operasi dan belanja modal), yakni 1 orang (1,1%) responden menjawab sangat tidak setuju, 5 orang (5,3%) menjawab tidak setuju, 4 orang (4,2%) menjawab ragu-ragu, 68 orang (71,6%) responden menjawab setuju, dan 17 orang (17,9%) dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju.

3. Uji Asumsi Klasik

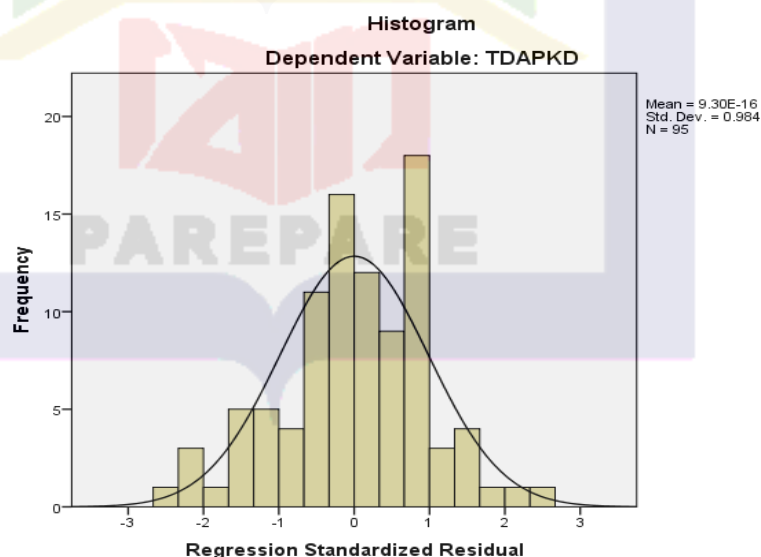
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal. Dalam menguji normalitas data maka ada dua cara yang dapat digunakan yaitu:

a) Analisis grafik

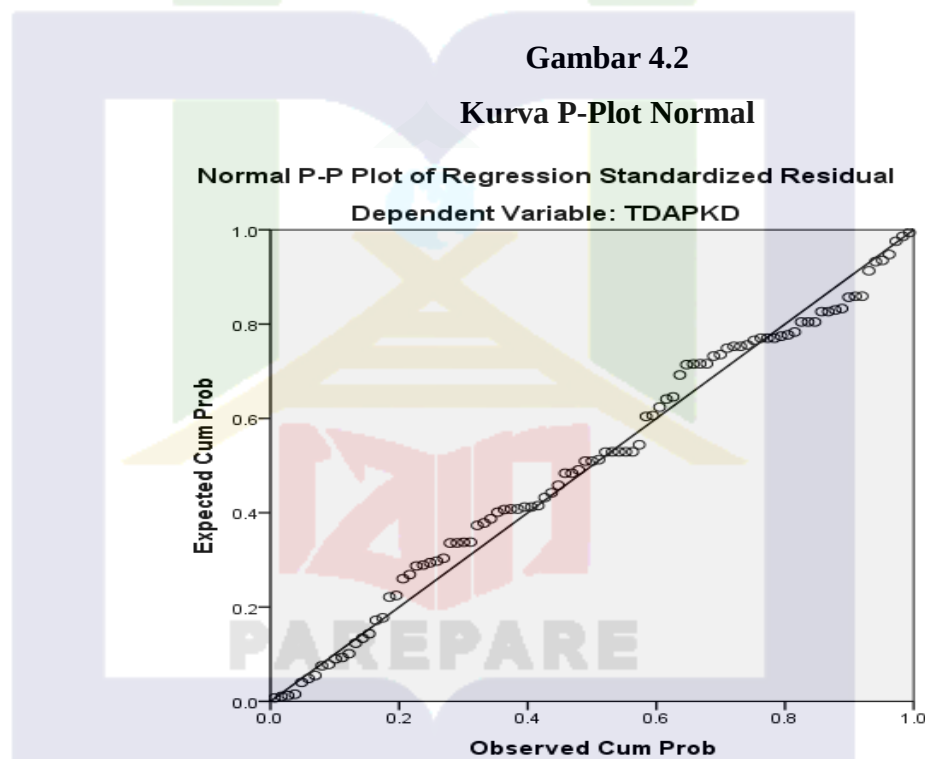
Gambar 4.1

Histogram dengan Kurva Normal



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Pada gambar 4.1 histogram dengan kurva normal diatas menunjukkan bahwa kurva transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki bentuk kurva yang cenderung di tengah tidak condong ke kiri maupun ke kanan, maka data pada variabel tersebut cenderung terdistribusi normal. Namun jika hanya melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Untuk itu, metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot*, berikut gambarnya di bawah ini:



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Pada gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa titik data menyebar di sekitar diagonal serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi.

b) Analisis statistic

Tabel 4.28
Uji Normalitas Kolmogrov-Sminorv

Unstandardized Residual	Tests of Normality		
	Statistic	df	Sig.
	0.075	30	0.200*

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan pengolahan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik *Kolmogrov-Sminorv* untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, yakni antara penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen tersebut. Berikut hasil data yang menunjukkan ada tidaknya multikolinieritas pada tabel berikut:

Tabel 4.29

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.871	2.532		.344	.732		
PLKD	.495	.083	.450	5.973	.000	.589	1.697
ALKD	.615	.111	.383	5.539	.000	.701	1.426
SAKD	.193	.086	.165	2.236	.028	.617	1.621

a. Dependent Variable: TDAPKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian analisis menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang.

Tabel 4.30
Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.871	2.532		.344	.732
PLKD	.495	.083	.450	5.973	.000
ALKD	.615	.111	.383	5.539	.000
SAKD	.193	.086	.165	2.236	.028

a. Dependent Variable: TDAPKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 4.30 tersebut yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel uji *Coefficients*. Pada tabel *coefficients* yang dibaca adalah nilai dalam kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berdasarkan tabel di atas maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,871 + 0,495 X_1 + 0,615 X_2 + 0,193 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 0,871 menunjukkan bahwa jika nilai Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah nol atau konstan, maka nilai Transparansi Laporan Keuangan Daerah adalah 0,871.
- b) Koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) sebesar 0,495, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1) akan mendorong peningkatan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,495 satuan dengan anggapan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) adalah tetap atau konstan.

- c) Koefisien regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) sebesar 0,615, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) akan mendorong peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,615 satuan dengan anggapan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) adalah tetap atau konstan.
- d) Koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) sebesar 0,193, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) akan mendorong peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,193 satuan dengan anggapan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) adalah tetap atau konstan.
- e) Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)

dapat menjelaskan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Tabel 4.31
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.695	.685	2.012	1.910

a. Predictors: (Constant), SAKD, ALKD, PLKD

b. Dependent Variable: TDAPKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,834 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 83,4%.

Sedangkan nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,685 yang berarti bahwa variabel dependen (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah) sebesar 68,5% dan sisanya sebesar 31,5% dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

e. Uji simultan dengan F-test

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), dan sistem akuntansi keuangan daerah (X3), secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Nilai Fhitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.32**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	840.670	3	280.223	69.250	.000 ^b
	Residual	368.236	91	4.047		
	Total	1208.905	94			

a. Dependent Variable: TDAPKD

b. Predictors: (Constant), SAKD, ALKD, PLKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil f hitung sebesar 69,250 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berarti penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dengan baik, memberikan kemudahan akses terhadap pengguna laporan keuangan daerah serta memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

f. Pengujian Hipotesis (Uji Parsial dengan T-Test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), dan sistem akuntansi keuangan daerah (X3), secara parsial atau individu menunjukkan seberapa berpengaruhnya terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.33**Hasil Uji T****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.871	2.532		.344	.732
PLKD	.495	.083	.450	5.973	.000
ALKD	.615	.111	.383	5.539	.000
SAKD	.193	.086	.165	2.236	.028

a. Dependent Variable: TDAPKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 23, 2025

a. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Berdasarkan tabel 4.33 menunjukkan bahwa nilai variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki koefisien regresi (β) yang lebih besar dari angka nol dan bertanda positif, serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Artinya variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Dengan demikian, hipotesis pertama telah terbukti bahwa diduga semakin tinggi penyajian laporan keuangan menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah semakin tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang baik sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Disamping itu, entitas pelaporan yang dilakukan sudah sesuai untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*), dan evaluasi kinerja. Komponen-komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yang diterima secara umum.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah mampu menunjukkan akuntabilitas yang dipercayakan, yakni dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, ekuitas pemerintah, sumber, alokasi, penggunaan sumber daya ekonomi, ketaatan realisasi terhadap anggarannya, cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta menyediakan informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan. Sehingga, penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan mampu mendukung teori yang ada, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.33 menunjukkan bahwa nilai variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki koefisien regresi (β) yang lebih besar dari angka nol dan bertanda positif serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Artinya variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, hipotesis kedua telah terbukti bahwa diduga semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan daerah menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mudahnya pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan daerah sesuai dengan asas demokrasi yang terbuka oleh berbagai media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mampu mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Di samping itu, informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan tidak hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melainkan kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah. Sehingga, aksesibilitas laporan keuangan daerah yang mudah dan mampu

mendukung teori yang ada, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.33 menunjukkan bahwa nilai variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki koefisien regresi (β) yang lebih besar dari angka nol dan bertanda positif serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,028. Artinya variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga diterima. Dengan demikian, hipotesis ketiga telah terbukti bahwa diduga semakin tinggi sistem akuntansi keuangan menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai sesuai dengan basis akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dan berlaku secara umum. Selain itu, laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mencakup unsur-unsur, baik pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maupun unsur-unsur Laporan Operasional (LO). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dikonversi agar sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Sehingga, sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan mampu mendukung teori yang ada, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Pembahasan Penelitian

1. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang semakin tinggi. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan dikatakan signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya penyajian laporan keuangan daerah, maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian informasi yang transparan akan mewujudkan akuntabilitas publik karena penyajian informasi yang utuh dan transparan ini akan menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari entitas publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Hehanussa (2015) yang mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kab. Ambon berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (LKPD) berhubungan erat dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui teori disclosure, yang menekankan pengungkapan informasi lengkap dan tepat waktu untuk memenuhi tuntutan publik. Pengelolaan keuangan daerah mencakup siklus perencanaan hingga pengawasan, diatur dalam PP No. 12/2019. Landasan teori disclosure mendukung hubungan ini karena pengungkapan wajib dan sukarela dalam LKPD meningkatkan penggunaan informasi oleh pemangku kepentingan, sehingga memperkuat akuntabilitas.

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik dan memenuhi karakteristik, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dapat menunjang terciptanya transparansi dan akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang mampu menunjukkan akuntabilitas yang dipercayakan, yakni dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas pemerintah, sumber, alokasi, penggunaan sumber daya ekonomi, ketaatan realisasi terhadap anggarannya, cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta menyediakan informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum.

Hal ini sesuai dengan kondisi riil yang ada, bahwa Kab. Pinrang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Selain itu, dapat dilihat bahwa banyak yang menjawab setuju pada pernyataan kuesioner informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang yang telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan dan mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap. Namun, Pemerintah Daerah Kab. Pinrang harus mampu meningkatkan kepercayaan kepada publik bahwa penyajian laporan keuangan daerah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

2. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan daerah menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang semakin tinggi. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan dikatakan signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudahnya aksesibilitas laporan keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna maka akan mampu menciptakan transparansi dan akan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Magdalena dan Kurniawati (2016) yang mengungkapkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Jember.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berhubungan erat dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui teori disclosure, yang menekankan pengungkapan informasi akurat dan tepat waktu via sistem akuntansi berbasis akrual. SAKD memastikan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang andal, mengurangi asimetri informasi bagi publik. Landasan ini selaras dengan stewardship theory, di mana sistem akuntansi memperkuat pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Jadi, semakin mudah akses bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan daerah sesuai dengan asas demokrasi yang terbuka oleh berbagai media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung akan mampu mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Di samping itu, informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan tidak hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

melainkan kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah, maka semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tercipta. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya Kab. Pinrang dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangan daerah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat luas.

Hal ini masih tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada, karena tidak semua laporan keuangan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang mampu memberikan kemudahan akses untuk para pengguna laporan keuangan. Banyak yang menjawab ragu-ragu, dan tidak setuju terhadap pernyataan kuesioner jika laporan keuangan daerah Pinrang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan juga banyak responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*). Namun, hal tersebut menjadi hal yang lumrah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang, karena tidak semua aktivitas dan kinerja keuangan dapat diketahui langsung oleh masyarakat luas disebabkan adanya sebuah pertimbangan, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih tetap terjaga utuh untuk mewujudkan *good governance* yang baik.

3. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang semakin tinggi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan dikatakan signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,028. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa baik sistem akuntansi keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Pemerintah Daerah yang baik adalah yang mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Magdalena dan Kurniawati (2016) yang mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Jember.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) berhubungan erat dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui teori disclosure, yang menekankan pengungkapan informasi secara mudah diakses untuk memenuhi hak publik. Aksesibilitas memungkinkan stakeholder memverifikasi penggunaan dana APBD, sehingga mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan pengawasan. Landasan teori ini didukung oleh stewardship theory di mana akses terbuka memperkuat pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Jadi, dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai sesuai dengan basis akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dan berlaku secara umum. Serta laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mencakup unsur-unsur, baik pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maupun unsur-unsur Laporan Operasional (LO). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dikonversi agar sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 akan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, tiap entitas pemerintah daerah khususnya

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menciptakan, mengoperasikan, dan memelihara sistem akuntansi keuangan daerah secara baik.

Hal ini sesuai dengan kondisi riil yang ada bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akuntansi akrual, meskipun masih terdapat beberapa instansi yang memakai basis akuntansi kas sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terutama entitas yang membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Banyak yang memberikan pendapat tidak setuju pada pernyataan kuesioner jika basis akuntansi penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis kas. Hal ini membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah bisa terorganisir dengan baik dan mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang semakin tinggi. Artinya, semakin baiknya penyajian laporan keuangan daerah, maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi riil di lapangan bahwa Pemerintah Kab. Pinrang mampu menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut pada tahun 2013, 2014, dan 2015.
2. Semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang semakin tinggi. Artinya, semakin mudahnya aksesibilitas laporan keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini masih tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, karena tidak semua laporan keuangan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang mampu memberikan kemudahan akses untuk para pengguna laporan keuangan dikarenakan ada pertimbangan tertentu yang tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Pinrang. Artinya, semakin baiknya sistem akuntansi keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi riil di lapangan bahwa Pemerintah Kab. Pinrang sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sehingga sistem akuntansi keuangan daerah bisa diteorganisir dengan baik.

B. Saran

Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, maka dalam hal ini Pemerintah Kab. Pinrang harus mampu menyajikan laporan keuangan sesuai karakteristik seperti relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, mampu memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan kepada masyarakat luas serta Pemerintah Kab. Pinrang mampu mengoperasikan, dan memelihara sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik sebagaimana amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku secara umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kab. Pinrang

Diharapkan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum. Sehingga, dapat dipublikasikan melalui media massa, seperti surat

kabar, radio, *website*, dan media lainnya yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong terhadap masyarakat.

Selain itu, diharapkan mampu memberi kemudahan akses untuk semua pihak yang berkepentingan. Dikarenakan masih terdapat beberapa instansi di Pinrang yang ragu-ragu dan tidak setuju jika masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui media massa dan internet (*website*), sehingga dengan penelitian ini menjadi bahan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Serta mampu menjaga, mengoperasikan serta sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik dan menyusunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sehingga, dengan sistem pengelolaan yang baik, akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

2. Bagi akademisi

Diharapkan untuk dapat menambah bahan pembelajaran mengenai akuntansi sektor publik ataupun akuntansi pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk dapat menambahkan metode wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner dari peneliti. Selain itu, dapat memisahkan variabel dependen antara variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dikarenakan kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Karena keterbatasan dalam penelitian ini menggabungkan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai satu variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, and Nahar, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi& Auditing” 8, No. 2, 2012.
- Abdul Hafiz Tanjung.. “Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM”, 2014.
- ArifinTahir, “Kebijakan Publikdan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Bandung :Alvabeta”, 2014
- Atika, Nurul. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023
- B.e.Supriadi “Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia”, 2017.
- Budi Mulyana. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah danAksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, JurnalAkuntansiPemerintahan”, 2 No. 1, 2006
- Domain Tjahjanulin. “Manajemen Keuangan Publik. Univeristas Brawijaya. Malang”, 2013
- Dedy Aries Poae and David P.E. Saerang, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, 2013.
- Eprints.umpo.ac.id, Landasan Teori Penyajian Laporan Keuangan Daerah.
- Eny, *et.al* “Teori Akuntansi. Surakarta: FEBI UIN Surakarta”, 2018.
- Fauziyah, and Reza Miftahul. “Pengaruh Penyajiandan Akseibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi”, 6, No. 6, 2017.
- Frihatni, A.A., Nirwana, and Syamsuddin. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab. Parepare. Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis”, 2021.
- Ghozali, and Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang”, 2013
- Hanim, and Sustika, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus

- Pada Pemerintah Kab. Langsa)", Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan", 2009
- J, Hehanussa. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta", 2015
- Krina, and Loina Lalolo. "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional", 2003
- Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN", 2010.
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta", 2009.
- Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta", 2004
- Mursyidi. "Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung" 2004.
- Mulyana Budi. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan", 2 No. 1, 2006 .
- Mustofa, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". 2012.
- Nabila Ayu Indria "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya"
- Nurul Atika, "Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene," Skripsi, IAIN Parepare, 2023.
- Permendagri No. 59 Tahun (2007). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Permendagri No 3 Tahun (2017). Tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- PP No. 58 Tahun (2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- R, Faristina. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kab. Semarang. Jurnal Fakultas Ekonomi", 2011

- Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005.Tentang StandarAkuntansi Pemerintah.Jakarta”. 2004
- Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta”, 2006.
- Republik Indonesia. “Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008.Tentang Keterbukaan Informasi Publik.Jakarta”, 2008
- Repo.darmajaya.ac.id, Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengaruh Disclosure.
- Riyan Eriko Zama, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Pringsewu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung”, 2016.
- Rizky Fudya Hartini, “Analisis Determinasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris pada LKPD Kab. dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017) (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang”, 2018.
- Rohman, and Abdul. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”.Jurnal Akuntansi dan BisnisVol 9 No 1, 2009.
- Romi Permadi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," Repository UIN.
- Sanjaya, Putra I Dewa., Sujana Edydan Sulindawati Ni LuhGedeErni.(2014).Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi, 2(1). Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 TentangStandar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Saputra, and Rahmawan. “Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah .Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang”. 2012.
- Saragih, and Charli Andreas. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun”. 2015.
- Sumiyati. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas.Jakarta
- Soesastro. “Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi”, 2005
- Sugiono, “Metode Penelitian Bisnis, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung” 2006

- Superdi “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, 2017.
- Syukri. S, (2023) Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kab. Parepare. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Tahir Arifin. “Kebijakan Publikasi dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta”, 2014.
- Tanjung Abdul Hafiz. “Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM”, 2014
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2003) tentang Keuangan Negara.Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2004) tentang Perbendaharaan Negara.Jakarta
- Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Jakarta
- Wahyuni, *et.al.* “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, 2014
- Wiyana Anim and Sutrisna Anna. “Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, 2014.



Lampiran : Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang

**PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PINRANG**

Kepala Badan	:	Agurhan,SE.Ak., MM NIP. 19710812 200312 1 001
Sekretaris	:	Andi Sadaruddin, S.Sos, M.Si NIP. 19701110 199402 1 002
Sub. Bagian Program		
Kasub. Bagian Program	:	MA'DIKA, SH., MM NIP. 19780912 200502 1 002
Penelaah Teknis Kebijakan	:	H. ARNITA, SE.,MM NIP.19850224 201001 2 003
Pengolah Data dan Informasi	:	ARDI PATA NIP. 19800106 200212 1 005
Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum		
Kasub. Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum	:	RAHMAWATI,SE., MM NIP.19741031 200804 2 001
Penelaah Teknis Kebijakan	:	BAHARUDDIN, SE NIP. 19770412 200901 1 009 HJ.NURAENI, SE NIP. 19801020 200903 2 003
Pengolah Data dan Informasi	:	NAIM NIP.19680717 200701 1 037

Pengadministrasi Perkantoran	:	FATMAWATI NIP. 19780918 202521 2 011
Sub. Bagian Keuangan		
Kasub. Bagian Keuangan	:	BERNADETTA, SE NIP. 19720608 200604 2 021
Bendahara	:	IRAWATY, SE., MM NIP. 19811028 201502 2 001
Penelaah Teknis Kebijakan	:	ALI MURTOPO, A.Md NIP. 19720611 199403 1 012 MUSTINA NIP. 19780810 200701 2 022
Bidang Pendapatan Daerah		
Kabid. Bidang Pendapatan Daerah	:	HARUMIN, SE NIP. 19750307 200312 1 006
Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah		
Kasub Bidang Pendataan Pajak Daerah	:	SITTI NAHARIAH, SP. NIP. 19721113 200701 2 007
Penelaah Teknis Kebijakan	:	LEONARDUS MITIN, S.M NIP.19850817 201001 1 004 HERMAWATI KAHAR, SE NIP. 19781127 200801 2 010
Pengolah Data dan Informasi	:	CHANDRA NIP. 19841229 201001 1 002
Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah		
Kasub bidang Penetapan dan	:	LUKMAN,SE

Penagihan Pajak Daerah		NIP.197407312002121002
Penelaah Teknis Kebijakan	:	ANDI MUHAMMAD RIDWAN, SE NIP. 19710512 200312 1 006
		MURSALIM, S.SOs NIP. 19821121 200212 1 005
		MUH. BAHRUN, S.M NIP.19840514 201001 1 009
Operator Layanan Operasional	:	HARTAWAINI NIP. 19840705 202521 2 040
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah		
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	:	HARIANTI,SE NIP.19830905 201101 2 009
Penelaah Teknis Kebijakan	:	RISNAWATI, S.AP NIP.19840623 201001 2 002
		NURHAEBAH, SE NIP.19841209 201001 2 005
		YAYU HASRYANTO NIP.19840612 201001 1 003
Bidang Aset Daerah		
Kabid Bidang Aset Daerah	:	RIHARI ANCE LOMO, SE NIP.19800408 200502 1 005
Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan		
Kasub bidang Perencanaan dan Pengadaan	:	ANDI EKA PEBRIANTI,SE NIP.19830201 201101 2 004
Penelaah Teknis Kebijakan	:	FAUZIAH ALATAS, SE NIP. 19810825 200604 2 028

		NURSIA, SE NIP.19690611 200212 2 011
Sub Bidang Evaluasi dan Pemanfaatan Asset		
Kasub bidang Evaluasi dan Pemanfaatan Asset	:	SHERLY, S.AP, MM NIP. 19820516 200604 2 029
Penelaah Teknis Kebijakan	:	ANWAR, SE NIP. 19790502 200701 1 009
Sub Bidang Pendataan		
Penilai Pemerintah	:	Hj.AISYA,SE NIP.197004271992032005
Pengolah Data dan Informasi	:	MARDIANA NIP.19800321 201001 2 004
Bidang Pembiayaan		
Kepala Bidang Pembiayaan	:	ANDI ARDIANSYAH,SE., MM NIP.19761215 201001 1 013
Sub Bidang Anggaran		
Kasub bidang Anggaran	:	ENDANG SUSILOWATI, S.SOS NIP. 19800305 200312 2 007
Penelaah Teknis Kebijakan	:	HAJERAH, SE., MM NIP.19771126 200701 2 010
		ZULFIKAR, S.AP., MM NIP.19811016 200701 1 006
		SAFRI BURHAN,S.SOS NIP.19820725 200701 1 002
		NURYANI SAHAJI, SH NIP.19801017 200701 2 009

Penata Layanan Operasional	:	HERIANI, SE NIP. 19860211 202521 2 019
Sub Bidang Perbendaharaan		
Kasub bidang Perbendaharaan	:	HD. MUHADIRAH, S.SOS, M.M NIP.19710428 199402 2 001
Penelaah Teknis Kebijakan	:	B ASIR, SH NIP.19730320 199501 1 001
		IRAWATL,SE NIP.19770626 201001 2 010
		DARMI, SE NIP. 19760610 200212 2 009
		HJ. BAHIRA, SH NIP.19750618 200312 2 005
		SAKWATI GALA, SE NIP. 19740209 200902 2 003
		HASRAWATI HAMKA, A.Md.Komp NIP. 19860319 200804 2 001
Sub Bidang Penatausahaan keuangan Penata		
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	:	APRIANDA SEPTIADI, SH. NIP.19730403 200212 1 009
Penelaah Teknis Kebijakan	:	RASMAWATI, S.M NIP.19800505 200701 2 020
		MASDIANA, S.M NIP.19830520 201001 2 004
		ANDI SAHARI BULANG

		NIP.19851012 201101 2 004
Bidang Akuntansi		
Kepala Bidang Akuntansi	:	EFFENDI, SE., M.Si NIP.19760926 200312 1 001
Sub Bidang Verifikasi		
Kasub bidang Verifikasi	:	Hj.HUSNIATI, S. Sos NIP. 19691209 199203 2 005
Penelaah Teknis Kebijakan	:	ASPIYANDY,SE NIP. 19840920 201001 1 020
		NURAENI, SE NIP.19790926 201101 2 003
Sub Bidang Pelaporan Keuangan		
Penelaah Teknis Kebijakan	:	NURLAELA SYAMSUDDIN,S.Sos NIP. 19680520 199003 2 012
		FAISAL KASIM SULO, SE NIP. 19870811 201502 1 001
		ARNITA ARDIN, SH NIP. 19840103 200801 2 002
Sub Bidang Monitoring Keuangan dan Evaluasi		
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	:	Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Si NIP. 19690817 199003 1 011
Penelaah Teknis Kebijakan	:	ANDI NURHAEDAH, SH NIP.19791205 200212 2 009
		MUH.NATSIR, S.M NIP.19771231 201001 1 030

Lampiran : Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Pinrang Periode 2022-2023

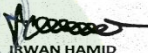


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

URAIAN	TA 2022			DALAM RUPIAH
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI TA 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.355.720.774.385,00	1.350.545.415.014,63	99,62	1.272.417.809.811,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.850.939.510,00	158.121.561.743,63	106,95	134.066.655.485,33
Pendapatan Pajak Daerah	39.659.864.000,00	42.237.496.794,90	106,49	35.439.158.745,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.588.000.000,00	4.345.482.903,00	121,11	2.558.134.604,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.656.573.810,00	10.656.573.810,00	100,00	8.170.957.229,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.946.501.700,00	100.882.008.235,73	107,38	87.898.404.907,33
PENDAPATAN TRANSFER	1.204.156.390.875,00	1.187.107.563.643,00	98,58	1.080.037.694.405,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.124.650.643.038,00	1.094.112.715.578,00	97,28	1.006.479.710.276,00
Dana Perimbangan	1.051.938.479.038,00	1.021.668.433.578,00	97,12	909.026.705.876,00
Dana Insentif Daerah (DID)	10.730.536.000,00	10.730.536.000,00	100,00	27.713.245.000,00
Dana Desa	61.981.628.000,00	61.713.746.000,00	99,57	69.739.759.400,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.505.747.837,00	92.994.848.065,00	116,97	73.557.984.129,00
Pendapatan Bagi Hasil	69.563.347.837,00	83.164.722.565,00	119,55	59.702.535.129,00
Bantuan Keuangan	9.942.400.000,00	9.830.125.500,00	98,87	13.855.449.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.713.444.000,00	5.316.289.628,00	143,16	58.313.459.921,00
Pendapatan Hibah	3.713.444.000,00	5.316.289.628,00	143,16	6.084.981.906,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	52.228.478.015,00
BELANJA DAERAH	1.271.542.393.804,00	1.199.437.988.472,00	94,33	1.157.651.716.397,00
BELANJA OPERASI	1.037.310.484.333,00	975.908.528.437,00	94,08	1.000.443.815.908,00
Belanja Pegawai	583.406.186.642,00	552.338.843.883,00	94,67	584.646.504.506,00
Belanja Barang dan Jasa	347.045.544.186,00	330.707.702.359,00	95,29	315.506.103.026,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah	106.858.753.505,00	92.861.982.195,00	86,90	98.231.208.376,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	2.060.000.000,00
BELANJA MODAL	227.636.289.179,00	217.366.099.785,00	95,49	155.359.754.689,00
Belanja Modal - Tanah	75.000.000,00	-	-	587.162.945,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	74.804.032.250,00	71.197.068.086,00	95,18	43.245.681.385,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	63.371.601.534,00	59.987.912.080,00	94,66	20.182.386.564,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.218.505.395,00	85.216.894.719,00	96,60	90.064.756.265,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	1.016.350.000,00	943.284.900,00	92,81	1.279.767.530,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	150.800.000,00	20.940.000,00	13,89	-
BELANJA TAK TERDUGA	6.595.620.292,00	6.163.360.250,00	93,45	1.848.145.800,00
Belanja Tak Terduga	6.595.620.292,00	6.163.360.250,00	93,45	1.848.145.800,00
TRANSFER DAERAH	135.311.872.200,00	130.201.832.151,00	96,22	136.168.429.698,00
BAGI HASIL	4.563.586.400,00	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.563.586.400,00	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	-	-	-	-
BANTUAN KEUANGAN	130.748.285.800,00	130.201.832.151,00	99,58	136.168.429.698,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.748.285.800,00	130.201.832.151,00	99,58	136.168.429.698,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	1.406.854.266.004,00	1.329.639.820.623,00	94,51	1.293.820.146.095,00
SURPLUS/DEFISIT	(51.133.491.619,00)	20.905.594.391,63	(40,88)	(21.402.336.283,67)
PEMBIAYAAN DAERAH	51.133.491.619,00	51.185.571.869,56	100,10	72.535.777.903,23
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.133.491.619,00	51.185.571.869,56	100,10	72.535.777.903,23
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.133.491.619,00	51.185.571.869,56	100,10	72.525.777.903,23
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	10.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-

URAIAN	TA 2022			REALISASI TA 2021
	ANGGARAN	REALISASI	%	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)		72.091.166.261,19	-	51.133.441.619,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PINRANG, 11 Agustus 2023
BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED**

DALAM RUPIAH

URAIAN	TAHUN	
	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	51.133.491.619,56	72.525.777.903,23
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	51.185.571.869,56	72.525.777.903,23
Subtotal	(52.080.250,00)	-
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	72.091.166.261,19	51.133.491.619,56
Subtotal	72.039.086.011,19	51.133.491.619,56
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	52.080.250,00	-
Lain - Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	72.091.166.261,19	51.133.491.619,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PINRANG, 11 Agustus 2023
BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ASET	3.111.929.390.815,40	3.051.545.420.208,31
ASET LANCAR	129.917.253.247,59	103.252.929.915,35
Kas dan Setara Kas	72.101.547.205,19	51.320.999.745,56
Kas di Kas Daerah	43.705.512.642,19	37.053.785.775,96
Kas di Bendahara Penerimaan	1.900.000,00	55.403.594,60
Kas di Bendahara Pengeluaran	429.940.288,00	24.306.396,00
Kas di BLUD	27.841.644.753,00	14.019.279.572,00
Kas Dana BOS	60.448.328,00	164.869.248,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	62.101.194,00	3.355.159,00
Setara Kas	-	-
Piutang	53.969.243.909,28	50.080.765.027,20
Piutang Pajak Daerah	13.963.805.500,20	12.914.152.595,20
Piutang Retribusi Daerah	62.900.000,00	54.800.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.540.875.023,08	-
Piutang Transfer Antar Daerah	24.000.568.644,00	26.615.303.871,00
Piutang Lainnya	1.401.094.742,00	10.496.508.561,00
Penyisihan Piutang	(18.405.742.824,88)	(10.691.118.627,88)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(17.009.648.082,88)	(6.686.832.256,74)
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.396.094.742,00)	(4.004.286.371,14)
Beban Dibayar dimuka	207.619.702,50	1.039.274.935,83
Persediaan	22.044.585.255,50	11.503.008.834,64
Persediaan Barang Pakai Habis	22.044.585.255,50	11.503.008.834,64
INVESTASI JANGKA PANJANG	30.001.459.647,49	30.318.075.852,49
Investasi Non-Permanen	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
Dana Bergulir	3.536.183.110,00	3.536.183.110,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	(3.536.183.110,00)	(3.536.183.110,00)
Investasi Permanen	30.001.459.647,49	30.318.075.852,49
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.001.459.647,49	30.318.075.852,49
Investasi Permanen Lainnya	-	-
ASET TETAP	2.657.588.044.033,65	2.623.378.395.735,20
Aset Tetap Tanah	494.690.085.435,52	495.501.779.206,52
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	535.865.403.034,00	475.805.337.960,50
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.179.029.363.867,37	1.119.452.587.508,10
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.147.438.269.243,54	2.045.252.334.819,54
Aset Tetap Lainnya	13.805.774.603,78	12.350.737.415,78
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.087.295.700,00	6.324.193.213,63
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.715.328.147.850,56)	(1.531.308.574.388,87)
DANA CADANGAN	-	-
Dana Cadangan	-	-

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ASET LAINNYA	294.422.633.886,67	294.596.018.705,27
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	2.531.357.859,20	2.639.377.718,80
Aset Lain - Lain	289.559.370.186,47	291.956.640.986,47
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.331.905.841,00	-
KEWAJIBAN	34.262.277.993,21	19.915.346.004,15
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.262.277.993,21	19.915.346.004,15
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	10.380.944,00	187.508.126,00
Pendapatan Diterima Dimuka	306.939.268,58	227.941.704,50
Utang Belanja dan Transfer	4.229.113.950,63	5.762.231.889,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	29.715.843.830,00	13.737.664.284,65
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
EKUITAS	3.077.667.112.822,19	3.031.630.074.204,16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.111.929.390.815,40	3.051.545.420.208,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PINRANG, 11 Agustus 2023
BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH - LO	1.315.073.472.463,80	1.250.316.633.102,78	64.756.839.361,02	5,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	166.257.763.974,88	137.063.132.029,08	29.194.631.945,80	21,30
Pendapatan Pajak Daerah - LO	43.259.216.709,15	36.058.043.565,42	7.201.173.143,73	19,97
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.353.582.903,00	2.562.634.604,33	1.790.948.298,67	69,89
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	10.661.573.810,00	8.175.957.229,00	2.485.616.581,00	30,40
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	107.983.390.552,73	90.266.496.630,33	17.716.893.922,40	19,63
PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.074.009.545.891,00	1.021.537.433.372,00	52.472.112.519,00	5,14
Transfer Pemerintah Pusat	983.629.433.053,00	936.739.950.876,00	46.889.482.177,00	5,01
Dana Perimbangan - LO	972.898.897.053,00	909.026.705.876,00	63.872.191.177,00	7,03
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	10.730.536.000,00	27.713.245.000,00	(16.982.709.000,00)	(61,28)
Transfer Antar Daerah	90.380.112.838,00	84.797.482.496,00	5.582.630.342,00	6,58
Pendapatan Bagi Hasil - LO	80.549.987.338,00	70.941.983.496,00	9.608.003.842,00	13,54
Bantuan Keuangan - LO	9.830.125.500,00	13.855.499.000,00	(4.025.373.500,00)	(29,05)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	74.806.162.597,92	91.716.067.701,70	(16.909.905.103,78)	(18,44)
Pendapatan Hibah - LO	23.704.720.231,92	39.487.589.686,70	(15.782.869.454,78)	(39,97)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	51.101.442.366,00	52.228.478.015,00	(1.127.035.649,00)	(2,16)
BEBAN OPERASIONAL	1.256.111.086.645,46	1.232.776.950.369,43	23.334.136.276,03	1,89
Beban Pegawai	552.356.175.914,00	579.616.236.947,00	(27.260.061.033,00)	(4,70)
Beban Barang dan Jasa	395.336.065.213,56	306.912.322.387,39	88.423.742.826,17	28,81
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Hibah	46.374.871.854,00	89.671.093.504,74	(43.296.221.650,74)	(48,28)
Beban Bantuan Sosial	-	2.060.000.000,00	(2.060.000.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.005.036.696,14	184.836.280.153,68	2.168.756.542,46	1,17
Beban Penyisihan Piutang	6.550.850.816,76	3.252.347.078,62	3.298.503.738,14	101,42
Beban Transfer	68.488.086.151,00	66.428.670.298,00	2.059.415.853,00	3,10
Beban Lain-Lain	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	58.962.385.818,34	17.539.682.733,35	41.422.703.084,99	236,17
KEGIATAN NON-OPERASIONAL				
SURPLUS NON-OPERASIONAL - LO	167.412.500,00	13.513.100,00	153.899.400,00	1.138,89
Surplus Penjualan Aset Non-Lancar	167.412.500,00	13.513.100,00	153.899.400,00	1.138,89
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	-	-	-	-
DEFISIT NON-OPERASIONAL - LO	140.238.765,00	3.706.715.502,17	(3.566.476.737,17)	(96,22)
Defisit Penjualan Aset Non-Lancar	140.238.765,00	3.706.715.502,17	(3.566.476.737,17)	(96,22)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	27.173.735,00	(3.693.202.402,17)	3.720.376.137,17	(100,74)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	6.163.360.250,00	1.758.145.800,00	4.405.214.450,00	250,56
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(6.163.360.250,00)	(1.758.145.800,00)	(4.405.214.450,00)	250,56
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	52.826.499.303,34	12.088.334.531,18	40.737.864.772,16	337,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PINRANG, 11 Agustus 2023
 BUPATI PINRANG

 IRWAN HAMID



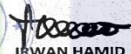
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	42.237.496.794,90	35.439.158.745,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.345.482.903,00	2.558.134.604,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.656.573.810,00	8.170.957.229,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.714.595.735,73	87.881.670.107,33
Dana Perimbangan	1.021.668.433.578,00	909.026.705.876,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-
Dana Keistimewaan	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	10.730.536.000,00	27.713.245.000,00
Dana Desa	61.713.746.000,00	69.739.759.400,00
Pendapatan Bagi Hasil	83.164.722.565,00	59.702.535.129,00
Bantuan Keuangan	9.830.125.500,00	13.855.499.000,00
Pendapatan Hibah	5.316.289.628,00	6.084.981.906,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	52.228.478.015,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.350.378.002.514,63	1.272.401.125.011,33
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	552.338.843.883,00	584.646.504.506,00
Belanja Barang dan Jasa	330.707.702.359,00	315.506.103.026,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Hibah	92.861.982.195,00	98.231.208.376,00
Belanja Bantuan Sosial	-	2.060.000.000,00
Belanja Tak Terduga	6.163.360.250,00	1.848.145.800,00
Bagi Hasil	-	-
Bantuan Keuangan	130.201.832.151,00	136.168.429.698,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.112.273.720.838,00	1.138.460.391.406,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	238.104.281.676,63	133.940.733.605,33
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	167.412.500,00	16.734.800,00
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	167.412.500,00	16.734.800,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Belanja Modal - Tanah	-	587.162.945,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	71.197.068.086,00	43.245.681.385,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	59.987.912.080,00	20.182.386.564,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.216.894.719,00	90.064.756.265,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	943.284.900,00	1.279.767.530,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	20.940.000,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	217.366.099.785,00	155.359.754.689,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(217.198.687.285,00)	(155.343.019.889,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	10.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	10.000.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	10.000.000,00

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.746.166.470,60	73.164.449.982,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	-	-
Kiriman Uang Masuk	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	53.746.166.470,60	73.164.449.982,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.923.293.652,60	73.027.166.079,64
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	-	-
Kiriman Uang Keluar	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	53.923.293.652,60	73.027.166.079,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(177.127.182,00)	137.283.902,36
Kenaikan / (Penurunan) Kas	20.728.467.209,63	(21.255.002.381,31)
Saldo Awal Kas	51.320.999.745,56	72.576.002.126,87
Koreksi SILPA Tahun Lalu	52.080.250,00	-
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	-	-
Saldo Akhir Kas	72.101.547.205,19	51.320.999.745,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PINRANG, 11 Agustus 2023
BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

PAREPARE



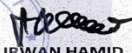
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	TAHUN	
	2022	2021
Ekuitas Awal	3.031.630.074.204,16	2.979.110.448.249,36
Surplus/(Defisit) LO	52.826.199.303,34	12.088.334.531,18
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	(6.789.160.685,31)	40.431.291.423,62
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(620.408.016,00)	(30.138.773,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka		
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	393.996.611,61	546.485.074,39
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	52.080.250,00	-
Koreksi Ekuitas - Investasi	(176.377.440,00)	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(6.098.739.196,53)	41.886.399.370,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	-	(2.120.809.500,00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(214.453.889,00)	(1.197.264.488,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	(1.163.773.380,24)	0,03
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pendapatan	-	(152.008.000,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.038.514.374,85	1.498.627.740,20
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas - Lainnya	-	-
Ekuitas Akhir	3.077.667.112.822,19	3.031.630.074.204,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PINRANG, 11 Agustus 2023
 BUPATI PINRANG


 IRWAN HAMID

PAREPARE

Lampiran : Kuisioner Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
	Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id , email: mail@iainpare.ac.id
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : IRMAYANTI MUCHTAR
 NIM : 2120203861211016
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu/Saudara/i
 Di Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Maka saya,

Nama : Irmayanti Muchtar
 Nim : 2120203861211016
 Judul : Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah

dan aksesibilitas terhadap transparansi
pengelolaan laporan keuangan pemerintahan
Kabupaten Pinrang

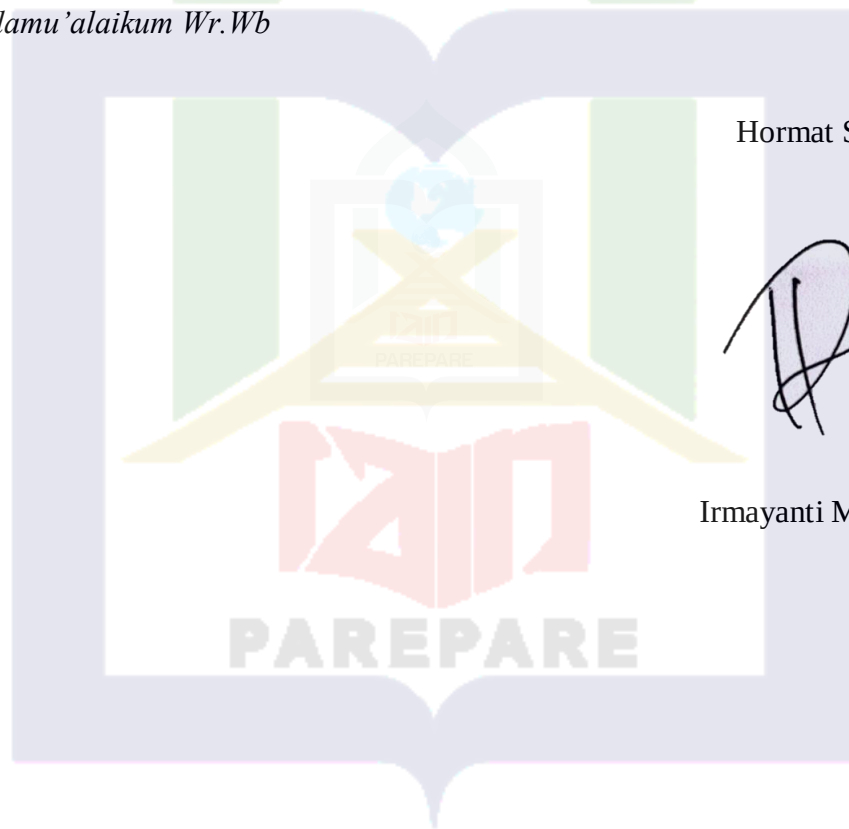
Untuk membantu kelancaran penelitian ini, saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini kami ucapkan termiakash.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya



Irmayanti Muchtar



I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Usia :
4. Instansi : ☐ Staff BPKPD ☐ Masyarakat
5. Pekerjaan/Jabatan :
6. Lama bekerja : ☐ 1-5 Tahun
☐ 5-10 Tahun
☐ (-) Khusus Masyarakat

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian Bapak / Ibu / Saudara /i untuk menjawab pernyataan/pertanyaan yang ada.
2. Jawaban yang tersedia adalah pernyataan sikap yang terdapat pada empat kolom jawaban sebagai berikut. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia dimana menurut Bapak / Ibu / Saudara /i adalah PALING TEPAT dari masing-masing pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju = 5

S : Setuju = 4

N : Netral = 3

TS : Tidak Setuju = 2

STS : Sangat Tidak Setuju = 1

3. Setiap pertanyaan hanya memerlukan satu jawaban
4. Terima Kasih atas partisipasi anda.

1. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X1)

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).					
2.	SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) tepat waktu.					
3.	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.					
4.	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini.					
5.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur					

	transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
6.	Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
7.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.					
8.	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyusun anggaran tahun berikutnya.					
9.	Informasi dari laporan keuangan SKPD yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pengguna.					
10.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah					

	menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
11.	Laporan keuangan yang disusun, diperuntukan memberikan informasi untuk para pengguna.					
12.	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan masa depan.					

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X2)

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.					
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (					

	Website).					
4.	laporan keuangan memuat informasi yang sudah seharusnya terpublikasi.					
5.	Laporan keuangan dapat diakses dimanapun dan kapanpun.					
6.	Seluruh pengguna memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses laporan keuangan.					
7.	Laporan keuangan daerah tidak dapat diakses melalui media masa dan internet					

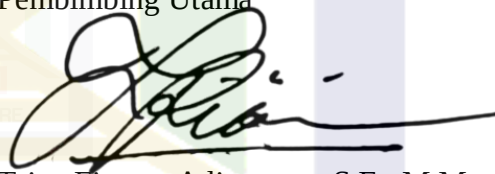
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	APBD disusun dengan pendekatan kinerja.					
2.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.					
3.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya kekas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan					

	bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.					
4.	Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.					
5.	Terdapat sistem untuk menyampaikan kritik dan saran.					

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Mengetahui
Pembimbing Utama



Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M
NIP. 199126062023211035

Lampiran : Hasil Pengolahan Data SPSS

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	3	3.2	3.2	4.2
	S	64	67.4	67.4	71.6
	SS	27	28.4	28.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	7	7.4	7.4	8.4
	S	63	66.3	66.3	74.7
	SS	24	25.3	25.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	6	6.3	6.3	6.3
	S	59	62.1	62.1	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	RR	14	14.7	14.7	16.8
	S	56	58.9	58.9	75.8
	SS	23	24.2	24.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P5)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	14.7	14.7	14.7
	RR	32	33.7	33.7	48.4
	S	39	41.1	41.1	89.5
	SS	10	10.5	10.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P6)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	2	2.1	2.1	3.2
	S	72	75.8	75.8	78.9
	SS	20	21.1	21.1	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P7)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	1	1.1	1.1	2.1
	S	77	81.1	81.1	83.2
	SS	16	16.8	16.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P8)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	12	12.6	12.6	15.8
	RR	40	42.1	42.1	57.9
	S	34	35.8	35.8	93.7
	SS	6	6.3	6.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	S	45	47.4	47.4	48.4
	SS	49	51.6	51.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	1	1.1	1.1	2.1
	S	48	50.5	50.5	52.6
	SS	45	47.4	47.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	11	11.6	11.6	12.6
	S	56	58.9	58.9	71.6
	SS	27	28.4	28.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	14	14.7	14.7	15.8
	S	66	69.5	69.5	85.3
	SS	14	14.7	14.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P5)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	2.1	2.1	2.1
	S	69	72.6	72.6	74.7
	SS	24	25.3	25.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P6)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	3	3.2	3.2	4.2
	S	73	76.8	76.8	81.1
	SS	18	18.9	18.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P7)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	3	3.2	3.2	3.2
	S	62	65.3	65.3	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P8)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	5	5.3	5.3	5.3
	S	60	63.2	63.2	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (P9)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.1	1.1	1.1
	RR	5	5.3	5.3	6.3
	S	74	77.9	77.9	84.2
	SS	15	15.8	15.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	6	6.3	6.3	9.5
	RR	34	35.8	35.8	45.3
	S	44	46.3	46.3	91.6
	SS	8	8.4	8.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	1	1.1	1.1	3.2
	RR	14	14.7	14.7	17.9
	S	65	68.4	68.4	86.3
	SS	13	13.7	13.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	10	10.5	10.5	13.7
	RR	35	36.8	36.8	50.5
	S	37	38.9	38.9	89.5
	SS	10	10.5	10.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	10.5	10.5	10.5
	TS	24	25.3	25.3	35.8
	RR	8	8.4	8.4	44.2
	S	42	44.2	44.2	88.4
	SS	11	11.6	11.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	1.1	1.1	1.1
	S	58	61.1	61.1	62.1
	SS	36	37.9	37.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P3)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	8	8.4	8.4	8.4
	S	61	64.2	64.2	72.6
	SS	26	27.4	27.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	RR	7	7.4	7.4	9.5
	S	59	62.1	62.1	71.6
	SS	27	28.4	28.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P5)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	72	75.8	75.8	75.8
	SS	23	24.2	24.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P6)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	9	9.5	9.5	10.5
	RR	14	14.7	14.7	25.3
	S	55	57.9	57.9	83.2
	SS	16	16.8	16.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (P7)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	5	5.3	5.3	6.3
	RR	4	4.2	4.2	10.5
	S	68	71.6	71.6	82.1
	SS	17	17.9	17.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

2. Uji Reliabilitas

a. Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.836	.846	8

b. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.833	.836	9

c. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.862	.864	3

d. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Reliability Statistics

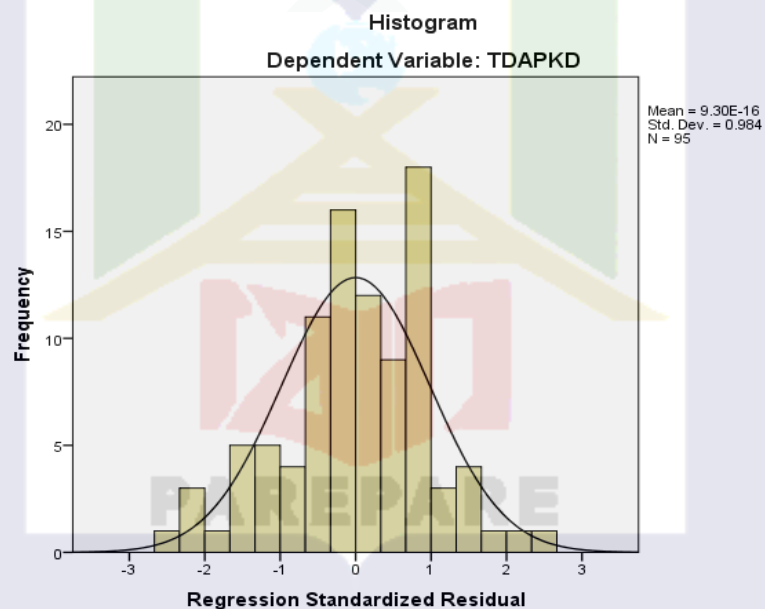
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.664	.748	7

Uji Asumsi Klasik

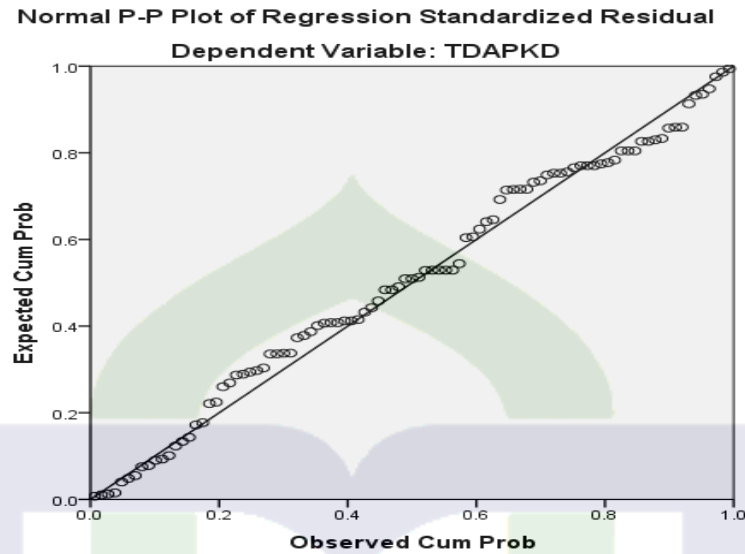
1. Uji Normalitas

A. Analisis Grafik

Histogram dan Kurva Normal



Kurva P-Plot Normal



B. Analisis Statistik

Uji Normalitas Kolmogorov-Sminorv

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.075	95	.200 [*]

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

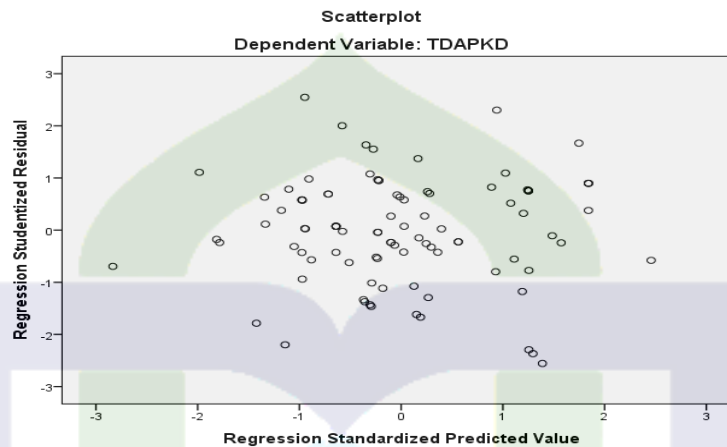
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.871	2.532		.344	.732		
	PLKD	.495	.083	.450	5.973	.000	.589	1.697
	ALKD	.615	.111	.383	5.539	.000	.701	1.426
	SAKD	.193	.086	.165	2.236	.028	.617	1.621

a. Dependent Variable: TDAPKD

3. Uji Heteroskedastisitas

A. Analisis Grafik

Diagram Scatterplot



Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.871	2.532		.344	.732
	PLKD	.495	.083	.450	5.973	.000
	ALKD	.615	.111	.383	5.539	.000
	SAKD	.193	.086	.165	2.236	.028

a. Dependent Variable: TDAPKD

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.695	.685	2.012	1.910

a. Predictors: (Constant), SAKD, ALKD, PLKD

b. Dependent Variable: TDAPKD

2. Uji simultan dengan F-Test

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	840.670	3	280.223	69.250	.000 ^b
	Residual	368.236	91	4.047		
	Total	1208.905	94			

a. Dependent Variable: TDAPKD

b. Predictors: (Constant), SAKD, ALKD, PLKD

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial dengan T-Test

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.871	2.532		.344	.732
	PLKD	.495	.083	.450	5.973	.000
	ALKD	.615	.111	.383	5.539	.000
	SAKD	.193	.086	.165	2.236	.028

a. Dependent Variable: TDAPKD

Lampiran : SK Pembimbing



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4593/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025
TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 144 Tahun 2025 Tahun 2025, tanggal 06 Pebruari 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
- b. Menunjuk saudara: **Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : IRMAYANTI MUCHTAR
- NIM : 2120203861211016
- Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
- Judul Penelitian : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 28 Juli 2025
Dekan.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Lampiran : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5852/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

03 Desember 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: IRMAYANTI MUCHTAR
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 23 Maret 2003
NIM	: 2120203861211016
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: DESA/KELURAHAN TEMMASSARANGGE, KECAMATAN PALETEANG, KAB. PINRANG .

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan tanggal 03 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran : Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kab. Pinrang

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0004/PENELITIAN/DPMP/PTSP/12/2025

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-12-2025 atas nama IRMAYANTI MUCHTAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0004/RT.Teknis/DPMP/PTSP/12/2025 Tanggal : 08-12-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0004/BAP/PENELITIAN/DPMP/PTSP/12/2025 Tanggal : 08-12-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Ansal Bakti No. 8 Soreang, Parepare
3. Nama Peneliti : IRMAYANTI MUCHTAR
4. Judul Penelitian : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Staf SKPD Bagian Keuangan dan Masyarakat
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-06-2026

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Desember 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp. 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HUAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI

DPMP/PTSP

Lampiran : Surat Selesai Meneliti dari Dinas BPKPD Kab. Pinrang

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Bintang Nomor 01 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
 Telepon (0421) 921658, Laman <http://pinrang.go.id>, Pos-el 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 000.9.2 / 871 / BPKPD / XII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGURHAN, SE.Ak., MM**
 N I P : 19710812 200312 1 001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : **IRMAYANTI MUCHTAR**
 NIM : 2120203861211016
 Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 23 Maret 2003
 Alamat : Jln. A. Johan Kab. Pinrang
 Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Telepon : 087 899 327 671

Telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang"** dari Tanggal 08 Desember s/d 19 Desember 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2025


AGURHAN, SE.Ak., MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip. 19710812 200312 1 001

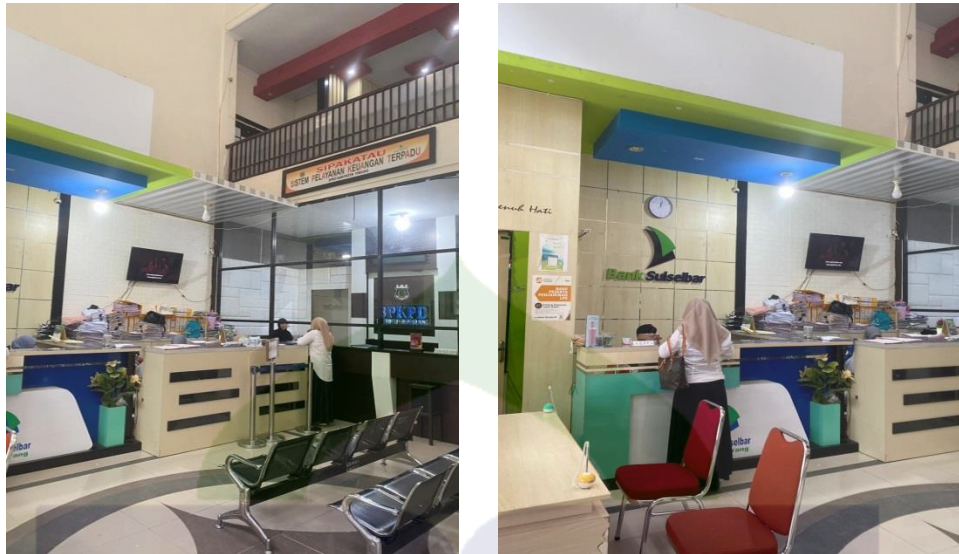
Lampiran : Dokumentasi Penelitian



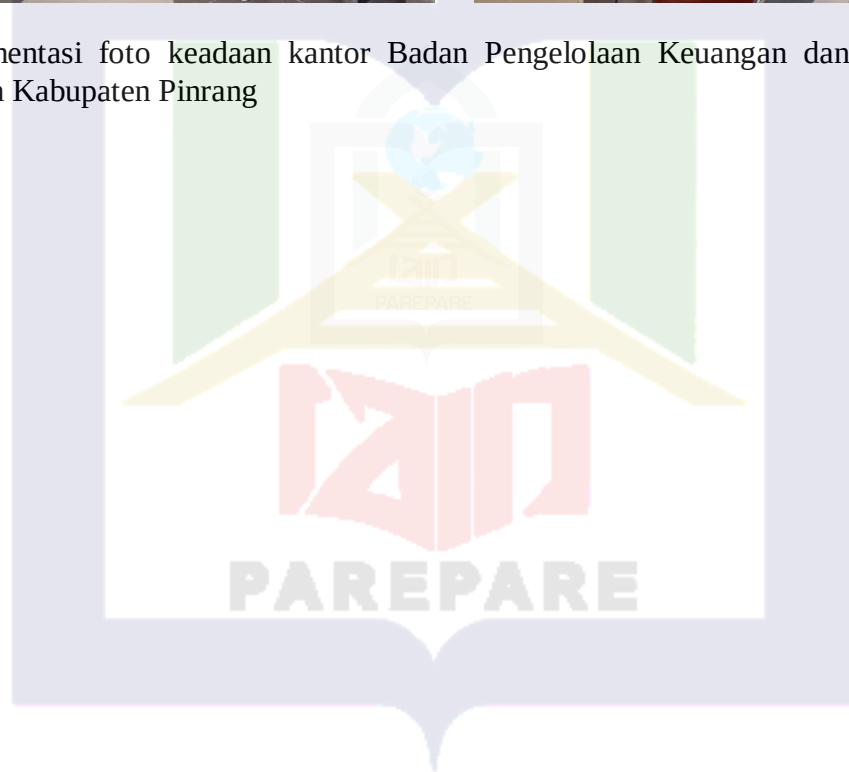
Dokumentasi foto bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang



Dokumentasi foto bersama dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang



Dokumentasi foto keadaan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang



BIODATA PENULIS



Irmayanti Muchtar adalah nama dari penulis karya ilmiah ini dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan yang berbahagia Bapak Mukhtar dan Ibu Almh. Hj. P. Sinnong. Penulis lahir di Pinrang, 23 Maret 2003. Penulis menempuh pendidikan di SDN 24 Pinrang, SMPN 2 Pinrang dan yang terakhir MAN Pinrang sebelum melanjutkan pendidikan S1 di IAIN PAREPARE pada tahun 2021. Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswi pada program studi S1 Manajemen Keuangan Syariah melalui jalur SPAN PTKIN. Penulis aktif diberbagai organisasi yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare. Penulis akrab disapa Gig dianimasi dan pernah menjabat sebagai Kordinator inventaris 2023 dan Kabid kesenian 2024. Berbagai prestasi telah diraih oleh penulis Juara 2 Lomba Menulis Surat Nasional dan berhasil menerbitkan tiga buku yaitu “Sepucuk Surat Untuk Ibu” tahun terbit 2024, “Yang Tak Tersampaikan” dan “Tak Seharusnya Cinta Tumbuh” yang terbit ditahun yang sama 2025. Selain itu penulis juga banyak menulis naskah teater diantaranya “Perempuan disudut kota” 2022, “Nawasena Arutala” 2023 dan “Otak beku” 2024 yang juga membawa penulis menjadi sutradara dalam tim produksi ANIMASI di Festival Teater Mahasiswa. Penulis juga menjadi Menteri Kesenian dalam cabinet Dema-I IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “ ***Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang.***”

Terakhir, penulis mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT. dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri saya sendiri.